

**POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM
MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)

Oleh:

Umi Uswatun Hasanah
NIM. 1717102127

**POGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Uswatun Hasanah

NIM : 1717102127

Jenjang : S-1

Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : **Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi ini ditulis sumber yang tepat.

Purwokerto, 16 Juli 2021

Yang Menyatakan



Umi Uswatun Hasanah

NIM. 1717102127

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM
MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**

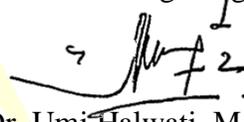
yang disusun oleh Saudara: **Umi Uswatun Hasanah**, NIM. **1717102127**, Program Studi **Penyiaran Islam** Jurusan **Komunikasi Penyiaran Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **22 Juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,



Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19810117 200801 2 010

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Dr. Umi Halwati, M.Ag
NIP 19840819 201101 2 011

Penguji Utama,



Dr. Asyabudin, M.A
NIP 19750206 200601 1 002

Mengesahkan,

Tanggal _____

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Di Tempat

Assalamu`allaikum, Wr.Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Uswatun Hasanah

NIM : 1717102127

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Penyiaran Islam

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`allaikum, Wr. Wb.

Purwokerto, 17 Juli 2021

Pembimbing,



Nur Azizah S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198101172008012010

**Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil
dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja**

Umi Uswatun Hasanah

1717102127

ABSTRAK

Komunikasi politik kerap identik dengan kekuasaan dan hanya dimiliki oleh penguasa. Padahal, proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan ketatanegaraan, seperti pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan publik juga bagian dari komunikasi politik. Gejayan Memanggil sebagai gerakan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di Yogyakarta ini juga melakukan komunikasi politik. Gerakan ini menolak regulasi yang dianggap tidak berpihak dengan masyarakat yakni Omnibus Law Cipta Kerja. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teori model plebisit.

Berdasarkan itu, penulis menyimpulkan bahwa pola komunikasi politik yang dilakukan oleh gerakan Gejayan Memanggil memiliki dua paradigma komunikasi politik, disesuaikan dengan siapa komunikannya. Apabila komunikasi politik tersebut tertuju kepada sesama masyarakat sipil, yang Gejayan Memanggil lakukan adalah paradigm konvergen. Sementara pada pemerintah atau penguasa, pola komunikasi yang terjadi adalah pardigma divergen.

Apabila parameter yang digunakan adalah kebijakan tersebut gagal disahkan, maka Gejayan Memanggil tidak menimbulkan efek alias tidak berhasil. Sebab sekarang regulasi tersebut sudah diteken Oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, Gejayan Memanggil memiliki efek akibat partisipasi dimana keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Gejayan Memanggil, Omnibus Law

MOTTO

“Melawan dengan riang gembira harus tetap ada, berlipat ganda, dan mengudara.”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur yang berlimpah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, aman, dan imun ketika duka begitu amat dekat. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, sebagai tanda bukti tanggung jawab kepada Ibu dan Bapak, yang senantiasa percaya kepada mimpi anak pertamanya. Bukti kecil ini, semoga dapat sedikit mengobati jerih payah Ibu dan Bapak dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Kendati dalam prosesnya, mesti terseok-seok.

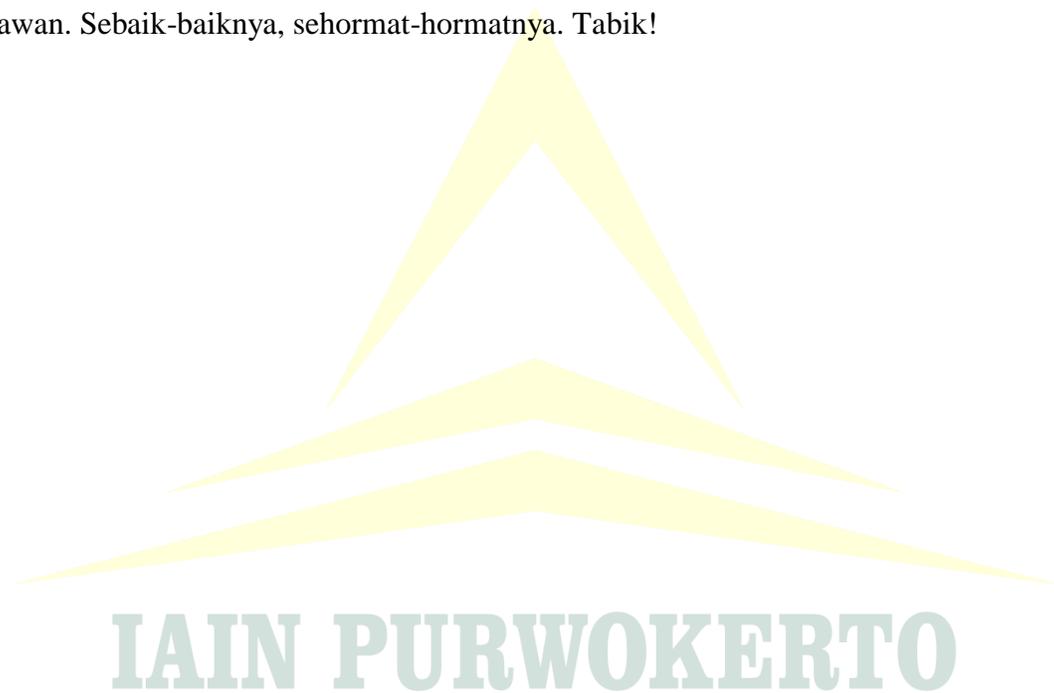
Ada banyak teladan yang diberikan Ibu dan Bapak kepada anak-anaknya, salah satunya: “Kami tidak selalu bisa memberikan apa yang diinginkan, tetapi Allah bisa. Maka, berdoalah!”. Kekuatan doa Ibu dan Bapak inilah yang membuat penulis mampu bertahan dalam segala situasi yang sulit, berat, dan nyaris putus asa. Tidak hanya orang tua, adik-adik penulis juga selalu memberi dukungan melalui canda dan tawa. Sehingga, penulis memiliki energi yang melimpah untuk melewati hari-hari yang berat ini.

Teruntuk keluarga besar Mbah Munarjo Manisem, terima kasih karena sudah menjadi keluarga yang dipenuhi kasih, sayang, gotong royong, dan hal lainnya. Melalui keluarga besar ini, penulis belajar mengenai ilmu kehidupan yang tidak didapatkan melalui bangku sekolah maupun perkuliahan. Sehingga, dapat menjadi bekal di kemudian hari. Semoga keluarga Mbah Munarjo Manisem tetap menjadi keluarga yang semakin kompak, saling dukung, dan dilimpahi segala kebaikan.

Belakangan ini, ada banyak berita duka yang melanda. Salah satu duka yang menyakitkan adalah ditinggal guru. Almahrum Abah Nurma Ali Ridwan merupakan dosen pembimbing yang mengajarkan banyak hal kebaikan kepada penulis. Salah satunya berusaha untuk tidak menyulitkan orang lain. Jarang penulis temui sosok seperti ini. Karya ilmiah ini

juga merupakan campur tangan kebaikan beliau dalam membimbing penulis. Semoga Abah meninggal dalam husnul khotimah. Aamiin...

Pendek kata, karya ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah berperan untuk mengingatkan, menemani, dan mendukung dalam segala situasi kondisi. Oleh kebaikan-kebaikan yang diberikan, penulis sampaikan *matur sembah nuwun*... Terakhir, dalam kondisi nyawa yang hanya dianggap angka oleh negara, semoga siapapun tetap bisa bertahan, meskipun harus mempertahankan hidup dengan mati-matian. Sebab, kita sudah melawan. Sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya. Tabik!



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat dan salam juga kepada Sayyidina Muhammad Saw., kepada keluarga, para sahabat, keturunan, dan juga semua orang yang mencintainya. Penulis hanturkan ribuan salam sejahtera. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basith, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto yang telah menjadi inspirator bagi mahasiswanya, penulis khususnya.
3. Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A. Selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
4. Dedy Riyadin Saputro, M.Kom. Selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas dakwah IAIN Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing yang tidak lelah memberikan arahan, semangat serta motivasi kepada penulis.
5. Muridan M. Ag., Selaku Penasihat Akademik yang senantiasa menerima curahan perihal akademik.
6. Almahrum H. Nurma Ali Ridwan, M.Ag selaku dosen pembimbing yang sampai akhir hayatnya, selalu menebar kebaikan.
7. Nur Azizah S.Sos.I., M.Si selaku dosen pembimbing pengganti yang selalu cepat dan tanggap dalam segala situasi.

8. Oki Edi Purwoko S. Farm., M.Si selaku pembina LPM Saka yang senantiasa memberikan ide-ide segar dalam membentuk persma yang handal.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Dakwah, terimakasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kedua orang tua penuls, Ibu Rusmiyati dan Bapak Basori Ikhsan, *matur sembah nuwun* sudah berkorban dalam banyak hal. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah.
11. Gendis Syari Widodari, dari Gejayan Memanggil, yang penulis banggakan, terima kasih atas jawaban-jawaban yang begitu mengesankan dan pengalaman yang berharga dapat diberi kesempatan untuk wawancara.
12. Ardi Syihab, dari Gejayan Memanggil, yang turut penulis banggakan, terima kasih atas jawaban yang mengesankan dan pengalaman berharga dapat diberi kesempatan untuk wawancara.
13. Kepada adik-adik penulis, Firda Muthoharoh, Sofiana Maulida, dan Affan Muhammad Riski, terima kasih senantiasa bersikap manis dalam menghadapi kakaknya yang sangat menyebalkan.
14. Keluarga besar Munarjo Manisem, terima kasih atas dukungan doa dan segalanya.
15. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa SAKA (LPM SAKA), terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk mengeksplorasi banyak hal sekaligus memberi ruang untuk merujuk sembari memutar Que Sera Sera.
16. Keluarga besar KPI C 2017, terima kasih atas tali persaudaraan yang begitu rumit dan mengesankan.
17. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto, terima kasih sudah menghadirkan Kakanda dan Ayunda yang memberikan banyak pembelajaran. Salah satunya komunikasi dalam menghadapi konflik.

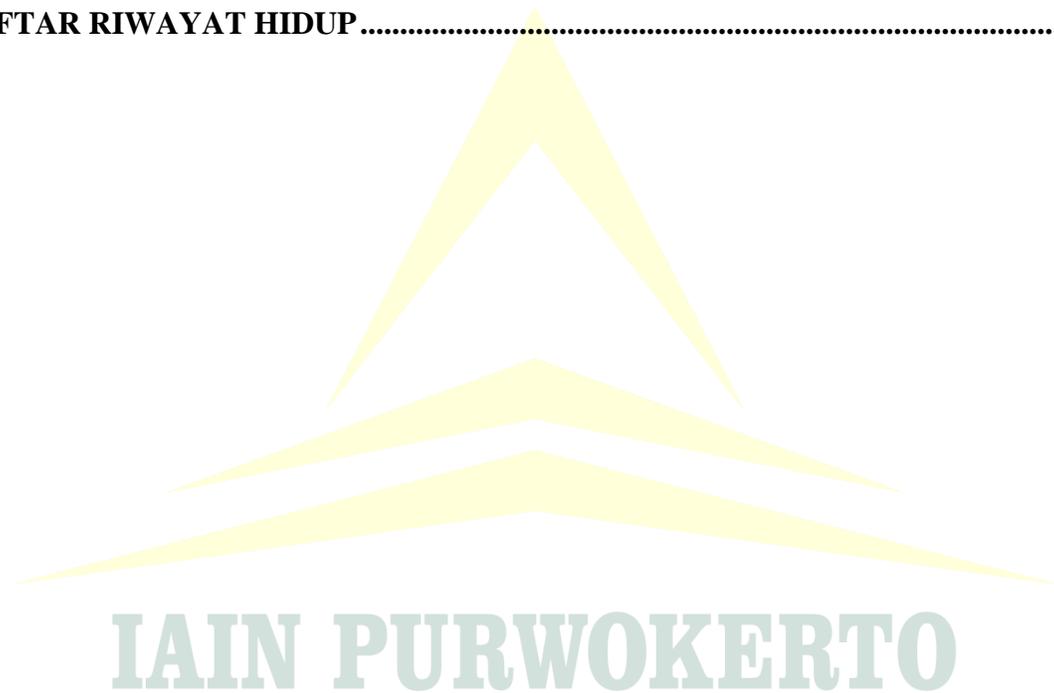
18. Teruntuk Muhammad Fadli Abdillah, terima kasih sudah kebersamaan penulis dalam menghadapi beragam masalah.
19. Teruntuk Anies Dwi Aldila, terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah yang mampu memahami dan mendukung dalam berbagai hal.
20. Teruntuk Mas Wahyu Budiantoro, terima kasih sudah menjadi guru, konsultan, dan panutan penulis dalam dunia penulisan.
21. Teruntuk kakak-kakak penulis di kampus, Nani Setiani, Wilujeng Nurani, dan Puput Khoerunnisa, terima kasih sudah menampung anak kecil ini.
22. Turuntuk Kakanda Andi Pratama, terima kasih sudah membuat penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat.
23. Teruntuk Aulia Insan, Rahayu Oktaviani, terima kasih sudah menjadi sahabat yang tidak lupa untuk misuh-misuh dalam menghadapi penulis. Tetaplah menjadi perempuan yang tangguh dan menginspirasi!
24. Teruntuk Zsa Zsa Syaharani, Fera Fitriannisa, Fikih Nur Seha, Salsabil Aulia, Dwi Askinita, Nur Rohmah Sri R terima kasih sudah menjadi teman yang manis.
25. Teruntuk teman-teman PPL, Alvin Hidayat, Dayu Wijayadin, Aulia Insan, Ika Sriani, terima kasih sudah menjadi tim.
26. Terakhir, terima kasih kepada siapapun yang telah menebar kebaikan-kebaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Komunikasi Politik	18
1. Hakikat Komunikasi Politik	18
2. Ruang Lingkup Komunikasi Politik	22
3. Unsur Komunikasi Politik	26
4. Efek Komunikasi Politik.....	27
5. Saluran Komunikasi Politik.....	28
B. Omnibus Law dalam Tinjauan Komunikasi Politik	29

C. Gejayan Memanggil: Gerakan Budaya atau Gerakan Politik?	33
D. Kebijakan Publik sebagai Produk Komunikasi Politik.....	35
E. Teori Gerakan Sosial Baru	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45
6. Sumber primer.....	45
7. Sumber Sekunder.....	46
8. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	49
2. Observasi	50
3. Dokumentasi.....	50
E. Teknik Analisis Data	51
1. Reduksi Data	51
2. Penyajian Data	51
3. Penarikan Kesimpulan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Profil Gejayan Memanggil.....	53
2. Pola Polisentrisme Gejayan Memanggil	57
3. Konsep Gejayan Memanggil dalam Pengorganisasian Massa.....	58
4. Omnibus Law dalam Isu Komuniasi Politik.....	62
5. Pandangan Gejayan Memanggil pada Omnibus Law Cipta Kerja	66
B. Pembahasan	74
1. Pola Komunikasi Politik Gejayan Memanggil dalam Isu Omnibus Law Cipta Kerja	74
2. Efek Gerakan Gejayan Memanggil.....	79

3. Teori Gerakan Sosial Baru pada Gerakan Gejayan Memanggil dalam Merespon Omnibus Law Cipta Kerja	83
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 *A tradisional view of political communication*

Gambar 1.2 *The Levels of Political Communication*

Gambar 1.3 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah

Gambar 1.4 Layar Tangkap akun instagram Aliansi Rakyat Bergerak

Gambar 1.5 tangap layar tagar #GejayanMemanggil

Gambar 1.6 tangkap layar akun Instagram Gejayan Memanggil

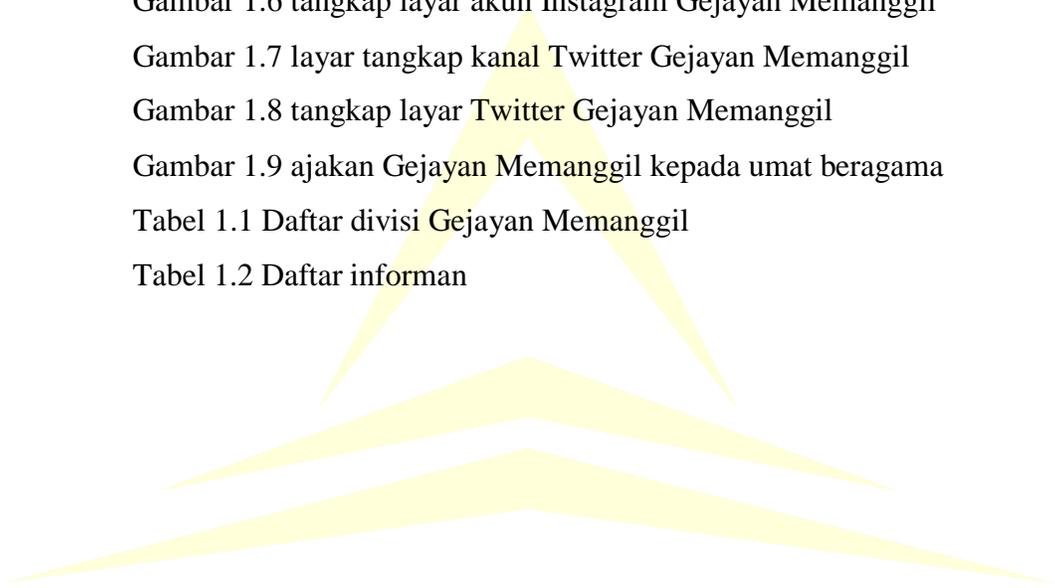
Gambar 1.7 layar tangkap kanal Twitter Gejayan Memanggil

Gambar 1.8 tangkap layar Twitter Gejayan Memanggil

Gambar 1.9 ajakan Gejayan Memanggil kepada umat beragama

Tabel 1.1 Daftar divisi Gejayan Memanggil

Tabel 1.2 Daftar informan



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Wawancara
- Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3. Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, menjadi lumrah bagi Indonesia untuk menghasilkan produk hukum berupa regulasi atau undang-undang. Tentu saja produk hukum ini menjadi pijakan untuk mengatur, melarang, maupun mewujudkan cita-cita negara. Tidak hanya itu, regulasi juga menjadi tolak ukur *rule of the game* dalam kehidupan bermasyarakat. Akan menjadi kacau kehidupan bermasyarakat apabila regulasinya tidak tepat. Atau, regulasinya sudah tepat, tetapi substansinya tidak sampai pada khalayak.

Setiap masyarakat memerlukan suatu negara yang dapat memberikan identitas, perlindungan, dan jaminan-jaminan kehidupan sosial mereka. Negara dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang mengatur aktivitas-aktivitas individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana negara itu bertindak sebagai kekuatan kolektif melalui perangkat peraturan-peraturan dan hukum-hukum tertentu.¹ Namun, tidak semua kebijakan publik berupa peraturan dan hukum tersebut, serta-merta dapat memberikan sesuatu yang masyarakat inginkan secara parsial.

Oleh karena itu, *design* atau rancangan kebijakan sudah seharusnya dibuat dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan penduduk berdasarkan potensi yang dimiliki. Tanpa adanya rancangan kebijakan yang sejalan dengan potensi masyarakat dan wilayah memungkinkan terjadinya kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik dalam jangka panjang. Kepentingan publik yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Bozeman (2007) sebagai pemenuhan kebutuhan publik

¹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Elkki, 7ex Media Komputindo, 2015), hlm.7.

yang bersifat vital yang berkesinambungan memiliki dampak yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak seperti kesehatan, infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta kesejahteraan.²

Pasca pembuatan kebijakan publik, pemerintah dan masyarakat membutuhkan saluran yang tepat untuk digunakan. Pasalnya, regulasi yang nantinya diterapkan kepada seluruh lapisan, akan menjadi sia-sia ketika substansinya tidak sampai secara komprehensif. Secara pragmatis, saluran yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan publik, akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan regulasi. Dalam hal ini, komunikasi yang lebih eksplisit untuk digunakan adalah komunikasi politik. Karena kebijakan publik merupakan bagian dari politik.

Menurut KBBI, politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan. Politik memiliki berbagai unsur, yakni partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.³

Bila telah berkembang, diri politik membantu berhubungan dengan politik dengan tiga cara: (1) mengungkapkan identitas personal – sebagai warga negara yang sesuai atau berbeda pendapatnya, anggota kelompok dan atau partai politik, sebagai pemimpin, pengikut, atau bukan pengikut, dan sebagainya; (2) mengevaluasi objek politik, menerima atau menolak pemimpin politik, kelompok, partai, kebijakan, dan autoritas; dan (3) memahami bahwa mencapai tujuan nyata dengan cara instrumental dengan memengaruhi pemerintah adalah yang terbaik.⁴

² Dr. Abas, MPA., *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*, (Depok: Alta Utama, 2017), Hal. 199.

³ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 6.

⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 109.

Sementara komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas alam yang ditandai dengan hubungan sebab akibat.⁵ Sehingga, komunikasi politik menjadi alat yang rangkaiannya harus diperhatikan, agar negara menjadi stabil dan berkesinambungan.

Secara sederhana, komunikasi politik adalah produksi, prosesi, efek suatu informasi, entah dari media atau interpersonal dengan konteks politik. Ini termasuk diskusi publik, berita media massa, sampai pembicaraan orang biasa. Komunikasi politik secara keseluruhan adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.⁶ Namun, komunikasi politik juga mengalami dinamika sesuai zaman. Komunikasi politik mempunyai tiga generasi apabila merujuk pada dinamikanya, yakni:⁷

1. Generasi pertama, retorika politik. Nyaris seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan seni berbicara (*art of speech*).
2. Generasi kedua, ditandai dengan dominannya peran media massa yang belakangan kerap disebut sebagai *media mainstream*.
3. Generasi ketiga, ditandai dengan perkembangan *new media*. Hal ini seiring dengan menguatnya sosial media, seperti situs jejaring sosial (*social network site*) dan *weblog* interaktif.

⁵ Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., *Komunikasi Politik Politik Komunikasi Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.6.

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 26.

⁷ Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si., *Media Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal.24.

Masing-masing generasi secara fundamental saling terkoneksi. Sebab, pemanfaatan *media mainstream* maupun *new media*, apabila tidak diimbangi dengan retorika politik yang mumpuni, hal ini akan menimbulkan bahaya yang lain. Dalam segi pengambilan kebijakan publik, akan mengancam masyarakat melalui produk hukum yang ugul-ugalan. Lantaran tidak ada komunikasi politik yang cakap, baik secara horizontal maupun vertikal. Padahal, generasi kedua ke generasi ketiga sudah menjadi tanda bahwa komunikasi politik sudah lebih efektif dan interaktif.

Dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan publik dan menciptakan kohesivitas dukungan, lembaga pemerintah, DPR, maupun institusi yudikatif juga telah banyak menggunakan internet. Begitu pun individu maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan tuntutan, dukungan maupun input politik lainnya, kini dengan leluasa dapat memanfaatkan internet sebagai saluran. Teknis penggunaan internet pun menjadi kian beragam, mulai dari web personal atau institusional yang dikelola secara professional, blog gratisan, hingga akun di situs-situs jejaring social (*social network sites*).⁸

Namun, Indonesia mengalami masalah yang cukup pelik mengenai kebijakan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat, ada berkisar 42.996 regulasi pada 2019. Rinciannya, peraturan pusat 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 14.453.⁹ Regulasi yang diproduksi terlalu banyak ini, membuat Indonesia mengalami obesitas sektoral. Akibatnya, pengambilan kebijakan publik, salah satunya ekonomi, menjadi tidak efektif.

Berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan kerja juga menjadi premis pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

⁸ Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si., *Media Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal.25.

⁹Gaudensius Suhardi, "*Obesitas Regulasi*", https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi (diakses pada 12 Januari 2021, jam 10.55)

Premis tersebut merupakan inisiasi dari Joko Widodo ketika berpidato pasca dilantik menjadi presiden 2019 lalu. Bahkan, Joko Widodo menantang DPR supaya menyelesaikan drafnya selama 100 hari dengan metode Omnibus Law. Realitas regulasi yang obesitas ini juga ditengarai sebagai alasan membuat investor kesulitan masuk ke Indonesia. Sehingga, Omnibus Law diklaim sebagai metode yang layak.

Omnibus Law merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem Common Law/Anglie Saxon seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina, dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya disebut Omnibus Bill. Frasa Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything).¹⁰ Maka, hadirnya Omnibus Law diharapkan menjadi angin segar bagi regulasi di Indonesia.

Metode Omnibus Law juga seringkali disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Lantaran, metode ini dapat memangkas aturan yang tidak sesuai dalam satu payung hukum, dan memuat banyak subjek dalam satu regulasi. Upaya ini juga dilakukan untuk menyembuhkan regulasi sektoral yang mengalami obesitas. Secara pragmatis, Omnibus Law mempermudah pemerintah untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih.

Omnibus Law Cipta Kerja berhasil diteken oleh Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu. Regulasi ini diberi nomor menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020, ada sebanyak 1.187. Di dalamnya, ada 11 klaster yang dibahas, yakni: (1) penyederhanaan perizinan, (2) persyaratan investasi, (3) ketenagakerjaan, (4) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6)

¹⁰ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, No. 1, 2019, hal. 6. Diakses dari Pada 11 Januari 2021, jam 18:16.

dukungan riset dan inovasi, (7) administrasi pemerintahan, (8) peneanaan sanksi, (9) pengadaan lahan, (10) investasi dan proyek pemerintah, dan (11) kawasan ekonomi.

Namun, sejak draf Omnibus Law Cipta Kerja beredar ke publik, muncul beragam polemik. Omnibus Law Cipta Kerja yang terkesan dibuat terburu-buru, dianggap cacat secara prosedur maupun substansi. Bahkan, jumlah halaman yang kerap berubah-ubah juga ditengarai sebagai regulasi yang belum digodok matang. Sementara dari substansi, ada sejumlah pasal yang bermasalah menurut beberapa versi. Sejumlah pasal yang seringkali dibahas, yakni: Pasal mengenai ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pers, dan pendidikan.

Akibatnya, muncul gerakan yang masif untuk menolak regulasi ini. Berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, jurnalis, dan lainnya. Sementara gerakan masif yang didengungkan melalui internet juga ditengarai berpengaruh terhadap gerakan masif di lapangan. Narasi yang tersebar, tidak jarang menjadi ide gerakan masif di lapangan atau puncak dari gerakan.

Salah satu gerakan yang gencar menolak Omnibus Law Cipta Kerja secara maya dan nyata adalah Aliansi Rakyat Bergerak melalui *electronic word of mouth* (EWOM) berupa tagar #GejayanMemanggil. Mulanya, gerakan melalui aksi demonstrasi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta terjadi sejak 5 Mei 1998. Dulu, kumpulan para mahasiswa ini diberi nama Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SOMASI). Mereka ikut andil untuk melawan Soeharto. Aksi ini dimulai di depan Universitas Sanata Dharma.

Namun, sejak isu yang berkembang menjadi lebih pelik dan makin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat, SOMASI berubah menjadi Aliansi Rakyat Bergerak. Kemudian, pada tahun 2019, Aliansi Rakyat Bergerak kembali menggelar aksi besar-besaran untuk menolak undang-undang. Kendati Gejayan Memanggil ini diinisiasi oleh mahasiswa, elemen di dalamnya lebih

komprehensif. Gerakan ini juga terus aktif merespons isu. Seperti RKUHP, RUU PKS, RUU Ketenagajaan, UU Pertanian, Revisi UU Minerba, dan lain sebagainya.

Kemudian, seringkali penelitian mengenai pola komunikasi politik secara vertikal maupun horizontal sebagai dampak dari pembuatan regulasi jarang diteliti. Padahal, setidaknya dalam pembuatan regulasi mesti melibatkan partisipasi rakyat. Dari persoalan ini, penulis tertarik untuk mengangkat bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gerakan Memanggil yang elemennya berisi mahasiswa, rakyat, dan lainnya, berusaha untuk mengomunikasikan aspirasinya kepada pemerintah dan menyebarkan narasi kepada sesama masyarakat sipil. Sehingga, penulis ingin mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pola Komunikasi Politik Gerakan Memanggil dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja”**.

B. Penegasan Istilah

1. Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Sehingga, secara garis besar, komunikasi harus memiliki suatu proses yang terdapat dari unsur kesamaan makna agar dapat berlangsung pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator (penyampai pesan) dengan komunikan (penerima pesan).¹¹

Laswell berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Artinya, dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud adalah pertukaran pikiran antar masyarakat yang menghasilkan efek yakni penolakan terhadap regulasi yang dibuat pemerintah.

¹¹ Tomy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hal.5.

Selain itu, Carl I. Hovland menjelaskan makna komunikasi sebagai proses komunikator untuk mengoperkan stimulant yang biasanya dilakukan dengan lambing-lambang bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain. Maka, pernyataan ini dapat mempertegas pendapat Laswell bahwa komunikasi memiliki efek, salah satunya dapat mengubah tingkah laku orang lain.

Dalam penelitian ini, komunikasi yang dimaksud adalah upaya penyampaian pesan dengan beragam cara seperti penggunaan verbal dan non verbal oleh Gejayan Memanggil. Sehingga dapat menimbulkan efek yang diinginkan.

2. Politik

Kata “politik” secara etimologis dari bahasa Yunani, *politeia (polis)* yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, berarti ‘urusan’.¹² Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.¹³ Sehingga, politik memiliki suatu tujuan yang jelas dan pasti, tidak abu-abu bahkan absurd.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.¹⁴ Tidak jarang proses ini juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

2. ¹² Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.

¹³ Ibid

3. ¹⁴ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.

Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembuatan kebijakan publik dalam bentuk regulasi yang menjadi salah satu elemen negara. Sementara dalam penelitian ini, regulasi yang dimaksud adalah Omnibus Law Cipta Kerja.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses pengoperasian lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.¹⁵

Tidak hanya itu, komunikasi politik juga melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politi, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sehingga, komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” kepada “yang diperintah”.¹⁶

Menurut ahli politik, Maswadi Ma'ruf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Dalam penelitian ini, komunikasi politik merupakan bagian dari agregasi Gejayan Memanggil kepada pemerintah dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Agregasi ini membentuk partisipasi masyarakat dalam memandang isu Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian komunikasi politik ini fokus pada pembentukan pesan melalui beragam saluran.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22.

4. Omnibus Law

Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* menyebutkan bahwa Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes, yang artinya memiliki kaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Maka, bila disambungkan dengan kata Law akan memiliki definisi sebagai hukum untuk semua.¹⁷

Oleh karena itu, Omnibus Law merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang layak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law/Anglio Saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. *Omnibus Legislating* disebut sebagai prosesnya, sementara *Omnibus Bill* merupakan produknya. Frasa Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).¹⁸

Dalam hal ini, Omnibus Law yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), yang dalam proses penyusunnya, mengundang pro kontra. Secara keseluruhan, yang dimaksud dalam penelitian ini, pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah kesamaan pengertian dan pemahaman Gejayan Memanggil dalam memahami Omnibus Law.

Sehingga, menimbulkan efek atau dampak yakni penolakan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang seringkali luput diperhatikan bahwa

¹⁷ Mochamad Januar Rizki, 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law, Senin, 14 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 20:26 WIB tanggal 22 Januari 2021.

¹⁸ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, No. 1, 2019, hal. 6. Diakses dari Pada 11 Januari 2021, jam 18:16.

itu merupakan produk hukum yang erat kaitannya dengan komunikasi politik. Tidak hanya komunikasi secara horizontal, dari pembuat kebijakan kepada pembuat kebijakan. Namun, juga dari pembuat kebijakan kepada masyarakat secara luas. Serta bagaimana gerakan masyarakat sipil menggunakan upaya preventifnya dalam menolak kebijakan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja?
2. Bagaimana efek dari komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik dan menggerakkan massa?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari persoalan yang dijelaskan di latar belakang masalah dan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian ini:

- a. Mengetahui pola komunikasi politik Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
- b. Mengetahui efek dari komunikasi politik Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik.
- c. Mengetahuai strategi Gejayan Memanggil dalam menggerakkan massa.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Manfaat ini dalam bentuk teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk mengetahui komunikasi politik yang dilancarkan oleh Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

- 2) Menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang komunikasi politik yang dilakukan Gejayan Memanggil dan efek yang didapat menggunakan model plebisit.
- b. Manfaat Praktis:
- 1) Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai komunikasi politik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan upaya penulis untuk menelaah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Kajian pustaka umumnya menelaah penelitian berupa jurnal, skripsi, thesis dan disertasi. Dalam hal ini, penelitian yang dimaksud berkaitan dengan komunikasi politik, efek komunikasi politik, dan respons masyarakat terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Upaya menelaah juga dijadikan penulis sebagai acuan dalam meneliti. Sehingga, penulis dapat menghindari penelitian yang sama atau melakukan plagiasi dengan penelitian yang sejenis diantaranya:

Pertama, Jurnal Komunikasi, dalam penelitiannya yang berjudul “Mitos *Good Influencer* dan Politik Citra Awkarin dalam Pusaran Demonstrasi Mahasiswa Menolak RKUHP”, Khumaid Akhyat Sul Khan menjelaskan bagaimana Awkarin membangun mitos *good influencer*. Padahal, sebelumnya, Awkarin dikenal sebagai *influencer* yang memiliki citra buruk, bahkan seringkali disorot media dengan pemberitaan yang negatif. Dalam membangun “wajah baru” Awkarin, ia kerap melibatkan diri dengan isu sosial yang sedang menjadi fokus utama. Peralihan yang dilakukan oleh Awkarin juga salah satu bentuk implementasi politik citra.

Dengan menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes, Khumaid membedah signifikasi foto Awkarin yang diunggah di Instagram. Hasilnya, Awkarin melakukan politik citra demi mendulang ekonomi politiknya. Politik citra ini memang penting bagi *influencer* karena dapat berimplikasi terhadap dirinya. Sebab,

influencer mesti mempunyai distingsi dengan *influencer* lain dan memeliharanya dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, Awkarin juga melakukan praktik yang sama dengan media mainstream, ia melakukan komodifikasi terhadap konten-konten yang diunggahnya. Sehingga menjadi sebuah pesan yang marketable.

Awkarin juga hanya menampilkan keterlibatannya sebagai aktivis atau volunteer dalam masalah-masalah sosial yang populer dan tengah menjadi perbincangan khalayak. Oleh sebab itu, kita bisa melihat kecenderungan Awkarin sebagai *influencer* yang tetap memilih masalah sosial untuknya terlihat sebagai aktivis tanpa mendalaminya. Isu-isu populer yang Awkarin pilih terbukti memengaruhi citra sekaligus popularitasnya dan, dengan demikian, berpengaruh pula terhadap praktik ekonomi politiknya.¹⁹

Persamaan penelitian Khumaid dengan penelitian penulis sama-sama berkaitan dengan politik. Serta melakukan aktivitas yang sama yakni menolak regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sementara perbedaannya, yakni dalam metode penelitian yang dilakukan. Apabila Khumaid menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes dengan membedah signifikasi foto yang diunggah Awkarin dalam akun instagramnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dalam penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Politik Calon Walikota dan Banda Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tahun 2017 Terhadap Masyarakat”, Nida Hamima meneliti bagaimana pola komunikasi politik pasangan calon urutan nomor satu Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar saat menjadi kontestan di pemilihan kepala daerah tahun 2017 lalu. Dimana pasangan calon nomor satu tersebut

¹⁹ Khumaid Akhyat Sulkhan, “Mitos *Good Influencer* dan Politik Citra Awkarin dalam Pusaran Demonstrasi Mahasiswa Menolak RKUHP”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 15, No. 1, 2020, hal. 33. Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/16696/10980> pada 19 Maret 2020, jam 14:00 WIB.

memanfaatkan budaya di Banda Aceh untuk menarik perhatian. Seperti penegakan syariat, isu mengenai perempuan, dan lainnya.

Hasilnya, Aminullah Usman dan Farid Nyak Umar menggunakan komunikasi politik logos dan ethos, dimana keduanya sangat signifikan dan termasuk rasional dan karismatik. Sosok Aminullah Usman di mata masyarakat dan para pemuda di kota Banda Aceh dengan karakteristik dipercayai masyarakat dengan background yang pernah menjabat menjadi Direktur Bank Aceh. Dan kedekatan beliau dengan pemuda melalui olahraga sepak bola. Hasil yang secara rasionalnya beliau dapat menyukseskan dalam usaha ekonomi perbankan Bank Aceh, secara ethosnya beliau dengan komunikasi yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat dan bahkan karakteristik, perilaku beliau menjadi suatu acuan masyarakat untuk memilih beliau.²⁰

Persamaan penelitian Nida dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai komunikasi politik. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan Nida juga sama dengan jenis penelitian penulis, yakni menggunakan kualitatif. Sementara perbedaannya, jika penelitian Nida mempunyai objek politikus, penulis menggunakan objek penelitian *group influencer* yang menolak omnibus law dan membentuk gerakan masif melalui dunia maya dan diaplikasikan dalam dunia nyata.

Ketiga, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, dalam penelitian yang berjudul “Kritik Warga pada RUU Omnibus Law dalam Paradigma Critical Legal Studies” yang disusun oleh Andri Fransiskus Gultom dan Marsianus Reresi menggunakan *critical legal studies (CLS)*, mengkritik kekeliruan nama omnibus law untuk RUU Cipta Kerja, tumpang tindih regulasi yang ada di dalamnya, baik menyoal

²⁰ Nida Hamima. Pola komunikasi politik calon walikota banda aceh pada pemilihan kepala daerah aceh tahun 2017 terhadap masyarakat. *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

buruh maupun pengusaha. Dari persoalan tersebut, menurut Andri dan Marsianus, menimbulkan konsekuensi yang beragam. Salah satunya mengenai kelayakan hidup para pekerja.

Kajian pada produk hukum perlu dicermati dari sudut pandang CLS lebih berupaya menemukan inkonsistensi pada teks-teks hukum dan berupaya memberi interpretasi kritis pada produk hukum. RUU Omnibus Law memiliki beberapa kelemahan sudut pandang CLS, dengan demikian analisa kritis yang inheren diperlukan, terlebih agar hukum tetap berpijak pada alur logika yang jelas, dan tidak kehilangan aspek kepastian dan kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum di masa sekarang dan mendatang.²¹

Dengan penelitian penulis, penelitian Andri dan Marsianus mempunyai kesamaan subjek masalah yang diteliti yakni RUU Cipta Kerja yang kerap disebut Omnibus Law. Sehingga, hasil penelitian ini sangat mendukung kelengkapan referensi penulis dengan melihat kaca mata kontra. Sementara perbedaannya, teori yang digunakan Andri dan Marsianus tidak sama. Apabila penelitian ini memakai *critical legal studies*, penulis menggunakan teori lain untuk meneliti objek yang sama.

Keempat, jurnal bertajuk Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Populer Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter “#gejayanmemanggil” yang disusun oleh Adang Rochiyat dan Arif Wiebowo dari Program Studi Magister Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dalam penelitian mereka, menjelaskan perihal siapa aktor yang paling populer di Twitter dengan tagar #gejayanmemanggil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ryan Resttu adalah aktor yang memiliki

²¹ Gultom, A. F., & Reresi, M, “Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 10, No. 1, 2020, hal. 46. Diakses dari <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497> pada 25 Februari 2021, jam 22:33 WIB.

nilai pengaruh tertinggi dengan nilai degree centrality yaitu 0.108072 dan aktor Tirto.id adalah aktor yang memiliki popularitas tinggi dengan nilai follower rank yaitu 0.999880312. Penelitian ini mengabaikan adanya akun buzzer pada Twitter. Namun demikian, aktor yang memiliki nilai pengaruh yang tinggi belum tentu adalah aktor yang memiliki nilai popularitas yang tinggi.²²

Kesamaan penelitian Adang dan Arief dengan penelitian penulis, sama-sama membahas mengenai Gejayan Memanggil. Sementara perbedaannya adalah pada objek yang dibahas. Apabila penelitian Adang dan Arief membahas aktor yang berpengaruh, penulis membahas bagaimana pola komunikasi politik dari subjek milik Adang dan Arief.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memetakan apa saja isi per bab yang ditulis penulis. Selain itu, sistematika juga berfungsi agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Penulis akan membagi pembahasan penelitian menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang tersebut penulis menjelaskan masalah yang membuat penulis tertarik pada penelitian yang akan dilakukan. Penegasan istilah, yakni penjelasan dari judul yang akan diangkat melalui uraian. Rumusan masalah, digunakan untuk mempermudah penulis agar fokus dalam meneliti dan mencari data. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu berisi hal-hal yang ingin dicapat saat penulis meneliti. Kajian pustaka yaitu acuan penulis agar tidak melakukan penelitian yang serupa. Dan, sistematika pembahasan berisi gambaran per bab dalam penelitian yang akan dilakukan.

²² Adang Rochiyat and Arief Wibowo, "Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Populer Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter '#gejayanmemanggil,'" *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 6, no. 2 (2019): 130–138.

Bab Kedua, yaitu kerangka teori berisi teori-teori yang akan menunjang penulis agar bisa memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori . Teori komunikasi tersebut memiliki tiga model yang akan dibahas dalam bab ini.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian ini berfungsi menjadi pisau untuk meneliti objek yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Bab Keempat, yaitu pembahasan yang didalamnya menjelaskan mengenai gambaran umum Gejayan Memanggil. Selain itu disajikan juga hasil analisis data yang mampu menggambarkan bagaimana pola komunikasi politik Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law serta apa efeknya terhadap kebijakan pemerintah.

Bab Kelima, yaitu penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dalam bab ini, terdapat kesimpulan dari penelitian yang penulis susun. Selanjutnya, saran yang diberikan penulis juga hasil dari penelitian yang ditemukan. Terakhir, kata penutup atas diselesaikan penelitian yang penulis susun.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Komunikasi Politik

1. Hakikat Komunikasi Politik

Membicarakan komunikasi politik tidak semudah membicarakan gerakan politik. Kesulitan ini muncul karena ada dua konsep yang mengusung disiplin ilmu ini, yakni konsep “komunikasi” dan “politik”. Komunikasi politik adalah sebuah studi interdisipliner atau dibangun atas berbagai macam ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda, dan konsep dalam membangun jati diri.²³ Kedua konsep ini mempunyai hubungan yang istimewa, karena di dalamnya memuat elemen yang dinamis. Sehingga, komunikasi politik dapat menentukan bagaimana corak kepribadian seorang insan politik.

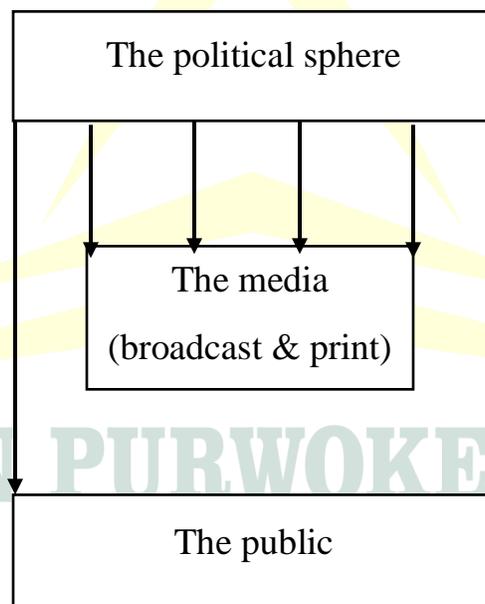
Peringatan Sigel bahwa kepribadian itu hanya sebagian dari keterangan tentang mengapa orang terlibat dalam politik, juga berlaku bagi faktor hukum dan faktor sosial. Pesan tentang politik dibawa melalui komunikasi politik ke dalam matriks peluang resmi yang dipersepsi, sumber daya sosial, dan motivasi sosial yang merupakan dunia seseorang. Pesan itu berisi informasi tentang pilihan yang tersedia. Pilihan mana yang diperhitungkan oleh mereka – yakni, yang ditanggapi, bukan yang diberi reaksi – menyebabkan perbedaan dalam kegiatan politik mereka.²⁴ Sementara Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual

²³ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 16

²⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.146

maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.²⁵

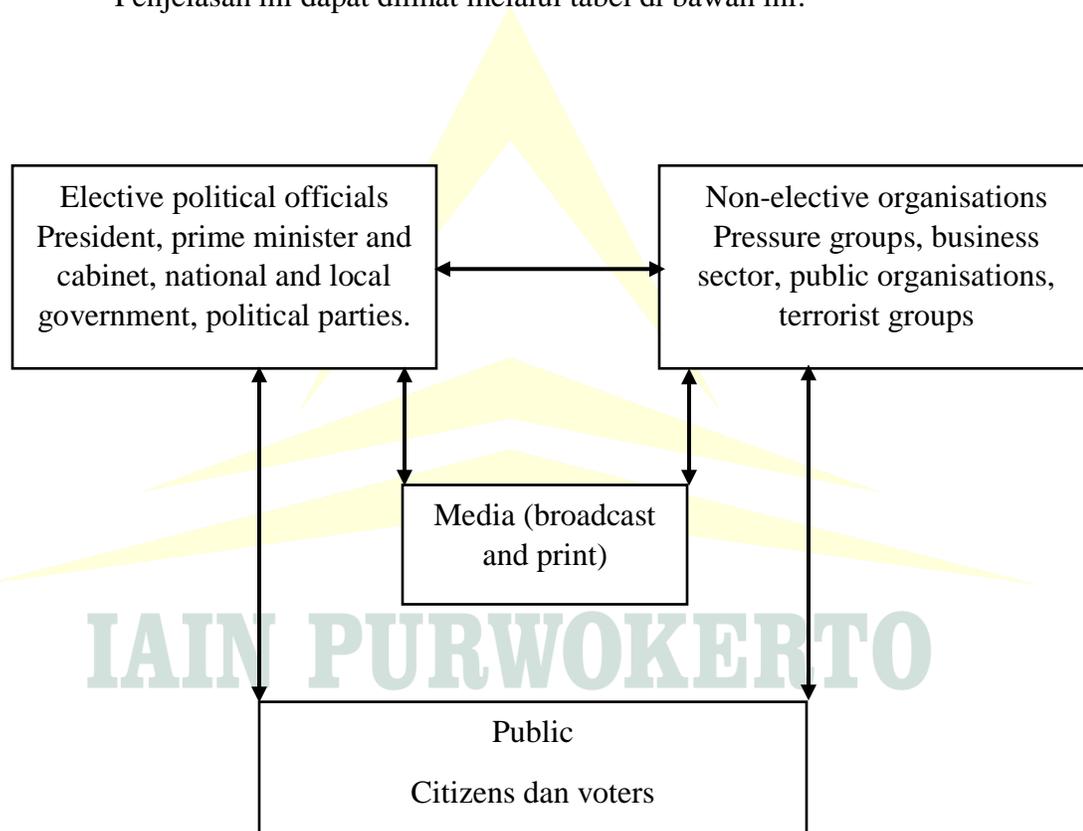
Namun, jika melalui proses komunikasi politik tradisional, pesan yang disampaikan prosesnya menggunakan media massa sebagai mediasi. Hal ini agar terjadi pencapaian target kepada seluruh masyarakat secara luas. Kendati begitu, proses komunikasi politik secara tradisional ini hanya terjadi satu arah saja yakni penguasa kepada rakyatnya. Dapat dilihat proses komunikasi politik tradisional ini melalui tabel di bawah:



Gambar 1.1 A tradisional view of political communication

²⁵ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 137.

Agar terjadi proses komunikasi, harus disertai dengan berbagai pihak yang saling berkomunikasi, khususnya dalam komunikasi politik. Idealnya, proses komunikasi politik berlangsung timbal balik. Dengan demikian, proses komunikasi politik adalah dimana semua unsur-unsur komunikasi saling berkaitan sehingga membentuk suatu makna atau maksud. Ada dua paradigma komunikasi politik, yakni linear (suatu arah) dan konvergensi (dua arah). Penjelasan ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.²⁶



Gambar 1.2 *The Levels of Political Communication*

²⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 11.

Dilihat dari gambar di atas, nampak pejabat politik terpilih seperti presiden, menteri, dan politikus dapat berkomunikasi langsung dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan lainnya. Tidak hanya komunikasi langsung, tetapi juga mengalami umpan balik. Mereka saling terkoneksi baik melalui media online dan cetak. Proses komunikasi ini membentuk ruang publik yang baru, sehingga tercipta partisipasi politik yang lebih beragam.

Selain itu, dalam proses komunikasi politik yang semua unsur saling terkoneksi, juga dapat tercipta proses komunikasi yang terbuka. Barang tentu, hal ini terjadi apabila ada umpan balik yang tercipta. Kendati begitu, proses komunikasi politik yang sangat terbuka juga kerap memicu konflik. Konflik inilah yang dijadikan “energy” bagi politik, sehingga dapat tercipta pengembangan, penyelesaian masalah, dan penambahan nilai atau konsep sosial politik.

Konflik berlangsung sebagai akibat dari ketidaknyamanan dari para pihak mengenai proses politik.²⁷ Sehingga, dapat kita gambarkan secara sederhana bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Namun, komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkan dimensi politik dengan segala aspek dan problematikanya.²⁸

²⁷ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 36

²⁸ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru* (Bandung: Rosdakarya, 2008), h.26

Komunikasi politik bisa kerap dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” kepada “yang diperintah”, juga sebaliknya. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja; mahasiswa, dosen, tukang ojek, dokter, satpam, penjaga warung, sopir, pilot, masinis, dan seterusnya.²⁹ Dengan begitu, mengkomunikasikan politik menjadi sebuah bahasa yang semestinya tidak hanya dimiliki oleh “yang memerintah”. Tetapi dimiliki oleh “yang memerintah” dan “yang diperintah”.

2. Ruang Lingkup Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai bidang studi pada mulanya belum sepenuhnya terlembagakan dengan baik. tidak hanya itu, definisi dan ruang lingkup komunikasi politik pun juga belum sepenuhnya dirumuskan ataupun disepakati oleh para ilmuwan. Kendati demikian, maraknya dan menguatnya intensitas kontestasi politik dimana makin menempatkan komunikasi politik sebagai fokus perhatian, pada akhirnya bidang kajian ini terus ditelusuri dan dikembangkan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu politik dan komunikasi.³⁰

Sebagai ilmuwan dengan latar belakang komunikasi dan politik yang kuat, Harold D. Laswell juga merumuskan ruang lingkup komunikasi politik, dengan formulanya yang terkenal yakni siapa (*who*), mengatakan apa (*says what*), kepada siapa (*to whom*), melalui media apa (*in which channel*) dan apa dampaknya (*with what effects*). Formula yang dikembangkan Laswell ini juga dikembangkan oleh berbagai ilmuwan dengan beragam sudut disiplin ilmu.

Dan Nimmo pun kemudian merumuskan ruang lingkup komunikasi yang mengacu pada konsep yang sudah dibuta oleh Laswell, yakni 1) komunikator

²⁹ Haidir Fitra Siagian, “Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik,” *Al-Khitabah* 11 (2015): 17–26.

³⁰ Nyarwi Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

politik; 2) pesan politik; 3) persuasi politik; 4) media komunikasi politik; 5) khalayak komunikasi politik; dan 6) akibat komunikasi politik. Di sini tampak bahwa Dan Nimmo menambahkan elemen baru yakni elemen persuasi politik.³¹ Namun, dengan rentang waktu antara 1960-1980an, para ahli masih memperdebatkan definisi sekaligus ruang lingkup komunikasi politik. Sanggahan, tambahan, maupun pengembangan formula yang ada, dilakukan oleh para ilmuwan yang fokus dengan komunikasi politik.

Salah satunya Brian McNair (2004). Ia memetakan ruang lingkup studi komunikasi politik, fokus pada tiga elemen penting yakni *pertama*, organisasi politik, dimana di dalamnya terdapat berbagai aktor politik dan institusi politik. Aktor politik yaitu para individu yang menyampaikan aspirasinya di dalam, melalui dan dengan menggunakan organisasi dan pendekatan institusioanl. *Kedua*, elemen selanjutnya adalah audience. Audience dalam komunikasi politik ini adalah sangat luas, menyangkut para khalayak yang menjadi pemilih dalam partai politik.³² dan *ketiga*, media. Media penting sebagai fokus kajian komunikasi politik karena dalam sistem demokrasi modern, media memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penyampai pesan-pesan dalam komunikasi politik dan juga sebagai pengirim pesan-pesan komunikasi politik.³³

Berbeda dengan McNair (2004), Pippa Norris (2004) tidak banyak memfokuskan diri pada definisi komunikasi politik, namun lebih banyak mengeksplorasi dan menyumbangkan peta ruang lingkup komunikasi politik. Menurut Norris (2004), ruang lingkup komunikasi politik terbagi menjadi tiga, yakni proses produksi, content, dan efek. Selain McNair, Philip Seib (2008) memetakan lanskap studi komunikasi politik dengan ruang lingkup pada studi

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

perspektif teori dan prinsip-prinsip komunikasi politik, media dan pemerintahan, pengaruh pesan-pesan politik terhadap proses politik, studi opini publik, agenda publik dan agenda media, studi kampanye dan pemilu, dan studi new media dan komunikasi politik dalam empat bagian publikasi.

Selain Norris (2004), dan Mc Nair (1995; 2003), Darren G. Lilleker (2006) juga mengembangkan model yang menggambarkan ruang komunikasi politik terkait dengan masyarakat dan ruang publik (public sphere).³⁴ Menurutnya, komunikasi politik sebagai bidang kajian dalam ilmu komunikasi harus ditempatkan dalam konteks berfungsinya organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang menghubungkan media dengan masyarakat dan sistem politiknya. Komunikasi politik dalam negara harus menempatkan warga negara merasa secara terus menerus merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya.³⁵

Namun, Lilleker (2006) berpendapat pandangan klasik mengenai ruang lingkup komunikasi politik seringkali fokus pada sumber dan motivasi para aktor serta komunikator politik dalam menyampaikan informasi politik di ruang publik demi mencapai tujuan politiknya. Lilleker (2006) juga sebut konsep ini masih mengandung kelemahan khususnya dalam memberikan posisi dan peran media saat proses komunikasi politik. Hal ini juga membuat Lilleker mengajukan tiga fokus elemen ruang lingkup komunikasi politik yang bisa diperhatikan

Tiga fokus elemen yang bisa menjadi ruang lingkup komunikasi politik, yaitu *pertama*, ruang publik ini menjadi arena interaksi masing-masing aktor politik dengan komunikator dalam proses komunikasi politik di sebuah negara. Dalam hal ini, ruang publik yang tercipta tergantung dari sistem apa yang dianut, serta bagaimana budaya sosial berkembang di masing-masing wilayah. Apabila

³⁴ Darren G. Lilleker. Key Concepts in Political Communication. London : Sage Publication. Tahun 2006. Halaman 1-5.

³⁵ Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik*, vol. 53, p. .

dalam sebuah negara, menggunakan struktur politik yang demokrasi, tentu dapat membentuk ruang publik yang demokratis.

Kedua, peran aktor-aktor non negara (*non state action*). Dalam hal ini, aktor non negara yang dimaksud adalah organisasi atau lembaga yang supra state dan berjenis korporasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu aktual. Aktor non negara berperan penting dalam panggung komunikasi politik, pasalnya para aktor ini tidak hanya bisa memengaruhi kebijakan melalui partai politik/pemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Ketiga, media. Peran media juga kian penting dalam menyampaikan pesan-pesan dan informasi kepada publik. Dalam negara demokrasi, *The political sphere the media (broadcast and print) the public* yang menjunjung tinggi kebebasan dan menghormati pluralism masyarakat, media melalui berbagai program tayangan dan peliputan pemberitaan yang disajikannya setiap saat mampu merangsang lahirnya diskusi-diskusi politik, memengaruhi dan menciptakan opini publik, dan memengaruhi kebijakan publik. Tidak hanya itu, daya tarik dan pengaruh media bahkan bisa membentuk persepsi, sikap dan perilaku politik warga negara.³⁶

Ruang lingkup komunikasi politik yang dari masa ke masa, mengalami perubahan, perkembangan, maupun eksplorasi mengindikasikan bahwa komunikasi politik memiliki ruang yang dinamis. Sehingga, panggung komunikasi politik tidak seharusnya dimonopoli oleh aktor politik praktis. Tetapi, dapat dimasuki oleh seluruh lapisan warga negara yang ingin ikut andil memberi pandangan mengenai produk politik. Hal ini, menjadi salah satu upaya agar negara dapat terasa dalam kehidupan setiap warga negaranya.

³⁶ Ibid.

3. Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik tentu saja memiliki bagian dalam dirinya. Sama halnya dengan ruang lingkup komunikasi politik, unsur komunikasi politik juga mempunyai beberapa versi. Namun, Cangara dalam bukunya menyebutkan ada lima unsur komunikasi politik, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima, atau efek.³⁷

a. Komunikator politik

Semua pihak yang terlibat dalam proses menyampaikan pesan mengenai politik. Seperti individu, organisasi, lembaga, maupun pemerintah.

b. Pesan politik

Merupakan pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun non verbal yang mengandung unsur politik.

c. Saluran atau media politik

Dalam hal ini, media massa dianggap sebagai salah satu saluran atau media politik yang kerap digunakan untuk menyampaikan pesan politik.

d. Penerima pesan politik

Yakni semua lapisan yang menerima pesan politik, yang diharapkan dapat memberi respons atau tanggapan pada pesan tersebut.

e. Efek atau pengaruh

Merupakan seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan.

Berbeda dengan Cangara, Sumarno mengklasifikasikan unsur-unsur komunikasi politik menjadi dua yakni suprastruktur dan infrastruktur politik:

1. Unsur pada suprastruktur

³⁷ Cangara, H. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yakni terdiri dari tiga kelompok yang berada di lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif.

2. Unsur pada infastruktur

Pada unsur ini terdapat banyak sekali kelompok seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa, dan para tokoh politik.

Unsur-unsur komunikasi politik ini, apabila saling terkoneksi dan mendapat umpan balik akan membentuk proses komunikasi yang lebih terbuka. Sehingga terjadi komunikasi politik yang lebih bervariasi dan terkonvergensi.

4. Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik terkadang akan membuahkan hasil, tapi juga bisa tidak gagal menghasilkan perubahan sosial. Komunikasi politik yang menjadi perhatian publik serta mendapatkan sorotan media dalam porsi yang besar dan terus menerus dapat saja menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Setidaknya, kondisi ini dapat mengguncang kedudukan penguasa sehingga isu-isu yang dihembuskan oleh para oposisi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Jika tidak, efek komunikasi politik ini akan menggelinding membentuk bola salju yang bisa saja menggoyahkan kursi kekuasaan, bila sang penguasa abai.³⁸

Artinya, komunikasi politik memiliki posisi yang sangat urgent di panggung politik. Dalam situasi normal, komunikasi politik terjadi pada situasi politik yang mapan. Sehingga, terjadi proses penyampaian pesan antar aktor politik ke partisipan lainnya. Saat penyampaian pesan tersebut, para aktor politik saling mempengaruhi dengan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini, efek

³⁸ Herdiansyah Amanu and Lovia Evanne, "Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisruhan Di Partai Demokrat," *Jurnal Balayudha* 1, no. 1 (2021): 26–32.

komunikasi politik terjadi. Mereka berebut siapa yang paling berpengaruh. Upaya ini juga dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kehendaknya.

Dan Nimmo mengklasifikasikan tiga akibat atau efek yang dapat ditimbulkan oleh komunikasi politik, yakni: *Pertama*, akibat kognitif: berita politik menyajikan informasi yang dibutuhkan orang ketika dihadapkan dalam situasi yang ambigu. *Kedua*, akibat afektif: komunikasi politik lebih cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang dalam nilai politik mereka. *Ketiga*, akibat partisipasi: keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat memengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik, di lain pihak akibat partisipasi juga dapat menekan partisipasi politik³⁹

5. Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik merupakan sarana atau alat untuk mempermudah pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun tindakan. Tidak hanya berupa media teknis yang dijadikan sarana penyampaian pesan, namun setiap individu yang ingin menyampaikan pesan dapat secara langsung menyampaikannya kepada orang atau suatu kelompok yang dituju.⁴⁰

Menurut Thomas, ada tiga jenis saluran komunikasi. Penjelasanannya sebagai berikut:

1. Komunikasi massa

Merupakan proses menyampaikan pesan langsung dari satu orang kepada khalayak. Penyampaian pesan ini, juga dapat disampaikan langsung dari komunikator kepada komunikan.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.

2. Komunikasi interpersonal

Merupakan komunikasi empat mata atau diartikan sebagai komunikasi “satu-kepada-satu”. Dalam komunikasi ini juga dibagi menjadi dua yakni komunikasi interpersonal secara langsung dan tidak langsung. Letak perbedaannya hanya di medianya saja. Langsung bertatap muka atau melalui gawai.

3. Komunikasi organisasi

Merupakan penggabungan komunikasi yang “satu-kepada-satu” dan “satu-kepada-banyak”. Sehingga, dalam prosesnya komunikasi organisasi melibatkan banyak orang dan pihak.

B. Omnibus Law dalam Tinjauan Komunikasi Politik

Omnibus Law digadang-gadang hadir sebagai solusi regulasi yang tumpang tindih. Salah satu tujuannya, agar para investor berbondong-bondong ke Indonesia. Sehingga, masyarakat dapat menikmati lapangan kerja yang tercipta. Mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.⁴¹

Ada beberapa kelebihan penerapan konsep Omnibus Law dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia antara lain:⁴²

- a. Mengatasi konflik peraturan perundang undangan secara cepat, efektif dan efisien.
- b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi
- c. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif

⁴¹ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–250.

⁴² *Ibid.*

- d. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama
- e. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus law yang terpadu.
- f. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Penataan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep Omnibus Law akan sulit untuk diterapkan dilapangan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Merujuk kepada konsep pelayanan satu atap harus menjadi model pelayanan dan pemberian izin sehingga para investor tidak direpotkan atau merasa dipermainkan oleh instansi terkait. Tentunya substansi peraturan perundang-undangan yang baru harus dibuat seefisien mungkin. Perizinan yang sifatnya tidak perlu dan memanjang birokrasi harus dibabat habis.⁴³

Namun, dalam praktiknya, Omnibus Law di Indonesia dianggap tidak nampak berpihak pada pekerja. Melainkan, lebih menguntungkan segelintir pihak saja. Sementara para pekerja tidak jelas nasibnya. Akibatnya, penolakan terhadap Omnibus Law gencar dilakukan. Salah satu penolakan datang dari gerakan masyarakat sipil. Secara lebih rinci, Omnibus Law juga mempunyai kelemahan dalam pembuatannya.

Sedangkan kelemahan penerapan konsep ini bila diterapkan antara lain:⁴⁴

- a. Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau di judicial review terhadap kebijakan omnibus regulation yang diterbitkan;
- b. Legislatif merasa “dikebiri” karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan legislatif;
- c. Akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Penolakan gerakan masyarakat sipil terhadap produk rancangan Omnibus Law ini memiliki berbagai macam alasan, selain poin-poin yang terkandung dalam Omnibus Law ini dinilai banyak merugikan kaum pekerja, produk Omnibus Law ini dalam penyusunannya juga sangat tidak partisipatif dengan tidak melibatkan kaum pekerja sebagai salah satu sektor yang nantinya akan merasakan langsung dampak Omnibus Law melalui rancangan undang-undang cipta kerja.⁴⁵

Poin-poin yang merugikan salah satu pihak, timbul karena dalam penyusunan Omnibus Law, tidak seluruh lapisan dilibatkan. Padahal, jika merujuk pada sistem negara, proses penyusunan kebijakan seharusnya dilakukan secara demokratis. Artinya, seluruh pihak yang terdampak dari kebijakan publik tersebut, harus dilibatkan. Namun, dalam penyusunan Omnibus Law, para pembuat kebijakan lebih banyak melibatkan pengusaha. Hal itu terlihat dari Satuan Tugas yang dibentuk oleh pemerintah didominasi oleh pengusaha.

Seperti yang dikatakan Dan Nimmo, politik dekat dengan konflik, lantaran konflik yang tercipta merupakan energi. Energi tersebutlah yang dapat memengaruhi produk politik. Sehingga, komunikasi politik hadir sebagai proses pembentukan perbuatan insan politik atas konsekuensi konflik. Dalam penyusunan Omnibus Law, ada lima kelompok komunikator politik yang terlibat konflik. Komunikator politik ini datang dari pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan, sampai masyarakat sipil yang mengkritik.

Pihak-pihak tersebut yakni Lembaga Eksekutif, Satuan Tugas (Satgas), Lembaga Legislatif, Partai Politik dan Pengusaha, dan Gerakan Masyarakat Sipil. Dari lima kelompok komunikator politik ini, hanya satu komunikator politik yang mengkritik yaitu dari Gerakan Masyarakat Sipil. Hadirnya gerakan masyarakat sipil

⁴⁵ Muhammad Fakhur Razy and Muhammad Fedryansyah, "Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 74.

ini terjadi karena ada efek komunikasi politik akibat partisipasi. Kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan, membuat mereka secara aktif terlibat politik. Upaya dilakukan dengan cara mengkritik produk politik yang dianggap pincang substansi dan cacat prosedur.

Masing-masing komunikator politik ini mempunyai saluran untuk menyampaikan pesan politiknya, yakni melalui media berupa website, media sosial, dan portal berita. Satgas Omnibus Law secara eksklusif membuat website dengan alamat www.omnibuslaw.id, sebagai media bagi tiga komunikator lainnya untuk mengkampanyekan Omnibus Law. Namun, sekarang website tersebut ditangguhkan entah oleh siapa.

Menggunakan alat bantu analogi pilar Simon Fisher maka ada beberapa pilar pendukung terjadinya konflik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus law seperti kurangnya komunikasi politik, minimnya partisipasi politik dan adanya relation atau relasi politik yang dibangun oleh pemerintah dan pengusaha.⁴⁶ Secara pragmatis, komunikasi politik menjadi pilar pertama dalam konflik yang terjadi pada penyusunan Omnibus Law ini.

Kurangnya komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah dan satgas kepada masyarakat sipil. Sehingga, masyarakat sipil kesusahan dalam mendapatkan informasi perkembangan serta isi dari rancangan undang-undang omnibus law.⁴⁷ Apalagi, pusat informasi seperti laman dengan alamat www.omnibuslaw.id, ditangguhkan dan tidak dipulihkan kembali. Hal tersebut membuat masyarakat bingung semakin terbatas untuk mengakses informasi mengenai Omnibus Law.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

C. Gejayan Memanggil: Gerakan Budaya atau Gerakan Politik?

Gejayan Memanggil hadir sebagai representasi kemarahan dan keinginan publik. Sehingga, dengan kepekaan tersebut, mereka berhasil merangkul banyak elemen dalam satu momentum besar yakni aksi demonstrasi di Yogyakarta. Melalui tagar #GejayanMemanggil, Aliansi Rakyat Bergerak mencoba membangkitkan kesadaran politik masyarakat secara luas dengan komunikasi yang lugas. Terlihat dari banyaknya massa aksi yang ikut ke jalan waktu itu. Ada beberapa aksi yang dilakukan Gejayan Memanggil.

Aksi yang pertama kali menggunakan tagar #GejayanMemanggil dimulai pada 23 September 2019. Dalam aksi tersebut, Gejayan Memanggil menolak Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), sebab dinilai sebagai upaya pelemahan lembaga KPK dalam menginvestigasi kasus-kasus korupsi. Sementara itu, pengesahan RUU KUHP dinilai bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi.⁴⁸

Aksi kedua terjadi pada 9 Maret 2020. Melalui tagar #GejayanMemanggilLagi, Aliansi Rakyat Bergerak berhasil mengumpulkan 1000 massa untuk berdemonstrasi di Gejayan. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, namun buruh, jurnalis, lembaga, komunitas, dan lainnya. Pada saat itu, masyarakat sipil tumpah ruah untuk menolak rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana rancangan tersebut dianggap tidak berpihak pada buruh dan kelompok rentan lainnya.

Perkembangan *new media* yang ditandai dengan penguatan media sosial menjadi generasi ketiga dalam komunikasi politik yang dilihat dari dinamikanya. Melihat realitas ini, Aliansi Rakyat Bergerak menggunakan *electronic word of mouth* (EWOM) berupa tagar atau hastag #GejayanMemanggil. EWOM ini dijadikan

⁴⁸ Gejayan Memanggil and Rino Andreas, "INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT TONTONAN Rino Andreas" 4, no. 1 (2020): 43–62.

Aliansi Rakyat Bergerak untuk memunculkan partisipasi masyarakat agar menimbulkan kesadaran politik. Sehingga, masyarakat sipil mulai mengintervensi kebijakan publik melalui demonstrasi di Gejayan.

“Gejayan Spectacle” dalam tagar #GejayanMemanggil terdiri berbagai kalangan yang ikut menyuarakan gagasannya melalui Instagram. Citra visual, like, dan komentar menjadi instrument yang mampu melawan secara kolektif kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Symbol perlawanan dapat diamati melalui berbagai poster yang dibawa peserta aksi. Poster kemudian diremediasi ke dalam media sosial yang bisa dijangkau oleh banyak pengguna. Seruan itu kemudian memunculkan kesadaran untuk ikut terlibat dalam gerakan.⁴⁹

Lebih lanjut, ketertarikan terhadap politik melalui daring disebabkan oleh dua hal yakni *friendship-driven activity* dan *interest-driven activity*. Perbincangan atau konten politik yang dibahas melalui *friendship-driven activity*, dapat membentuk ketertarikan seseorang terhadap politik. Sementara dalam media sosial, *interest-driven activity* dapat terjadi akibat *friendship-driven activity*. Di era yang serba virtual, hal semacam ini sudah melekat sebagai budaya serta dapat membentuk gerakan politik.

Apakah Gejayan Memanggil merupakan gerakan budaya atau gerakan politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mesti diketahui terlebih dahulu bagaimana definisi budaya. Budaya sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh anggota masyarakat. Sehingga, budaya memiliki sifat dinamis. Maka, dapat disimpulkan bahwa gerakan budaya adalah upaya perubahan menggunakan sentuhan disiplin ilmu ke dalam sesuatu yang dipelajari dan alami secara sosial.

Sementara gerakan politik lazimnya lebih terarah pada upaya menciptakan aksi atas dasar kepentingan politik, memobilisasi dukungan rakyat untuk tujuan

⁴⁹ Ibid.

politik, serta mempertahankan kekuasaan dan kekuatan politik yang dimiliki. Forum utama gerakan politik adalah mimbar politik yang terkait dengan institusi politik. Posisi mahasiswa pada gerakan semacam itu bukan lagi sebagai komunikator, tetapi lebih sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan menerapkan kebijaksanaan politik. Agar bisa memainkan peran demikian dibutuhkan networking yang baik, keahlian meyakinkan rakyat agar mau memberi dukungan, serta kemauan membuka diri menerima berbagai masukan. Satu hal yang harus terus dipelihara oleh para aktivis gerakan politik adalah komitmen bahwa mereka adalah bagian dari rakyat yang sedang mereka perjuangkan sendiri.⁵⁰

Maka, jika dilihat dari hasil tagar #GejayanMemanggil, Aliansi Rakyat Bergerak merupakan kombinasi dari gerakan budaya sebagai jalan menempuh tujuan politik. Dimana Gejayan Memanggil menggunakan media sosial sebagai salah satu produk gerakan budaya untuk memobilisasi massa. Sehingga, dalam hal ini, Gejayan Memanggil membuka diri sebagai komunikator yang menjelma menjadi kelompok penekan dalam bentuk daring; mendasari, mengarahkan, memberi arti pada setiap tingkah laku melalui media sosial. Kemudian, menciptakan gerakan massa yang lebih masif dan besar. Dengan fokus mengintervensi kebijakan publik sebagai produk politik.

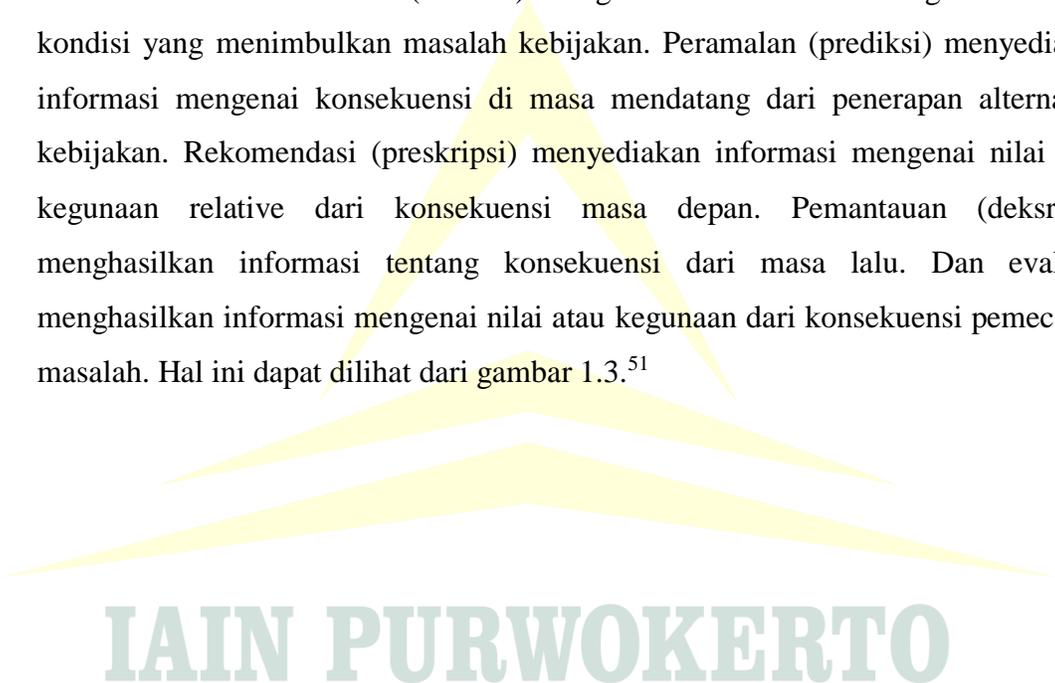
D. Kebijakan Publik sebagai Produk Komunikasi Politik

Dalam struktur tatanan kehidupan bernegara, persoalan masyarakat menjadi hal yang mesti diselesaikan bersama. Apalagi jika persoalan tersebut menjadi “masalah” yang nyaris seluruh warga negara mengalaminya. Hadirnya kebijakan publik menjadi solusi pemecahan masalah dalam tatanan ini. Kesempatan memecahkan masalah, akan lebih mudah jika melalui tindakan publik. Sudut pandang

⁵⁰ Sunyoto Usman, “Arah Gerakan Mahasiswa Gerakan Politik Ataupun Gerakan Moral” (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1999), <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=9140>.

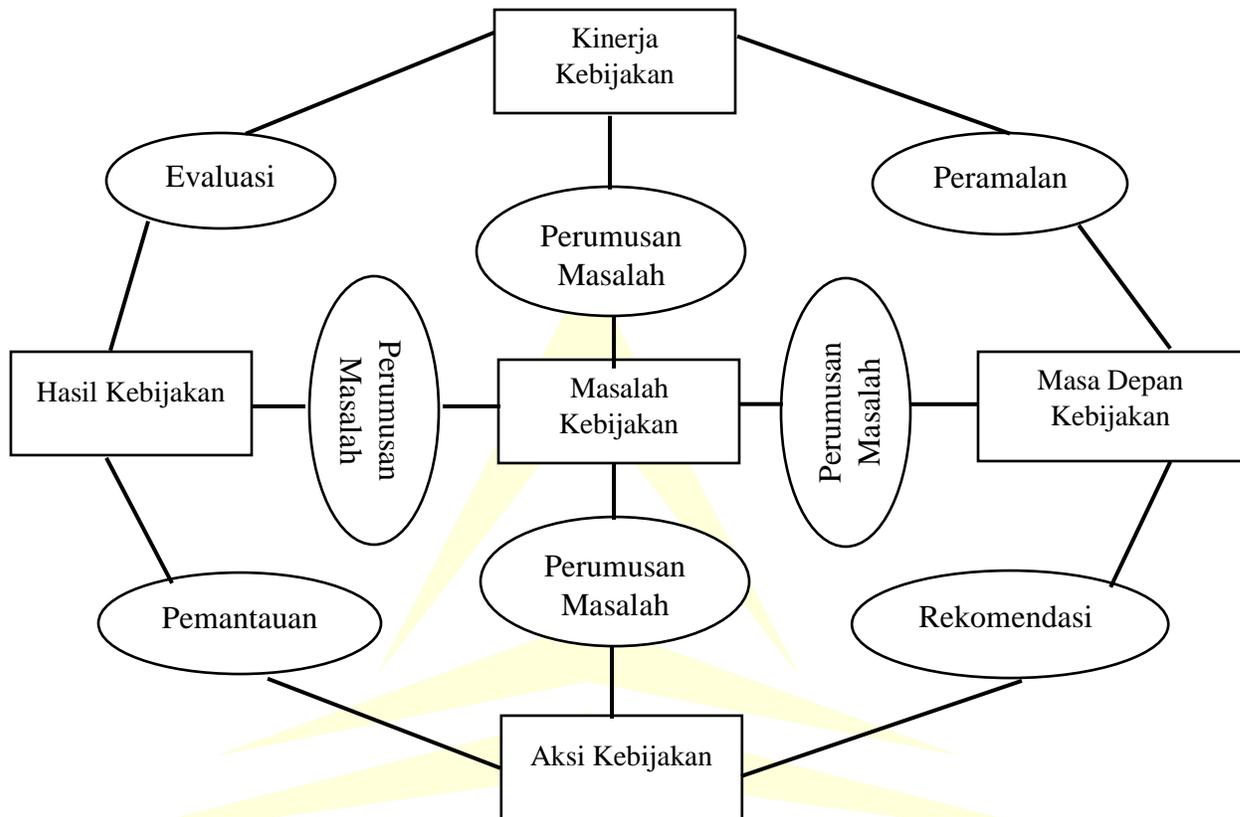
yang “tepat” dalam memandang masalah, dapat menciptakan kebijakan publik yang tidak timpang. Sehingga, dalam prosesnya, pembuatan kebijakan mesti menggunakan metodologi analisis kebijakan yang tepat. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus.

Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternative kebijakan. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi masa depan. Pemantauan (deksripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi dari masa lalu. Dan evaluasi menghasilkan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.3.⁵¹



IAIN PURWOKERTO

⁵¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 21



Gambar 1.3 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah

Sebenarnya kebijakan publik adalah merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah (Dye, 2008) ataupun “*the sum of government activities*” (Peters, 1982). Pengertian ini pada dasarnya bukan upaya untuk penyederhanaan konsep kebijakan publik akan tetapi bahwa kebijakan publik membutuhkan apa yang disebut otoritas publik yang absah, mengharuskan kebijakan publik menjadi domain dari agen publik yakni pemerintah (Bozeman, 1985).⁵²

⁵² Dr. Abas, MPA., *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*, (Depok: Alta Utama, 2017), Hal. 72.

Esesensi kebijakan publik merupakan instrument penting pemerintah untuk menyelesaikan urusan atau masalah publik. Ditunjang dengan sumberdaya ekonomi, politik, dan birokrasi tidak serta menjadikan pemerintah berhasil dalam kebijakannya. Meskipun beberapa pandangan menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan seringkali diawali dengan kegagalan manajerial tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lebih dari itu, beberapa teoritis melihat bahwa kegagalan negara, yang secara lebih khusus kegagalan kebijakannya merupakan kegagalan politik.⁵³

Oleh karena itu, menurut Hoogerwerf, obyek dari ilmu politik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah, proses dari pembuatan kebijakan, serta efek atau akibat dari. Selain itu, Hoogerwerf juga berpendapat bahwa kebijakan umum (public policy) yang dimaksud adalah upaya pemerintah untuk membangun masyarakat yang terarah dan terstruktur melalui kekuasaan yang mereka punya. Sehingga, dalam praktiknya, kekuasaan politik dan pengaruh seluruh rakyat atau sebagian dari mereka terhadap tindakan pemerintah, melalui pernyataan yang dinyatakan atau disiratkan, hanya bisa dilakukan dengan cara diwakilkan.

Namun, perwakilan itu memerlukan alat untuk menyampaikan persetujuan yang dinyatakan atau disiratkan itu kepada sejumlah pejabat yang lebih kecil yang bertindak untuk kepentingan komunitas. Dan jika keputusan pejabat itu harus mengikat setiap orang, maka harus ada alat untuk memberi informasi kepada rakyat tentang isi keputusan itu. Lebih-lebih bila kita menambahkan bahwa pengaturan politik itu harus demokratis, maka juga harus ada alat bagi warga negara untuk menyatakan preferensi kebijakan mereka kepada pembuat kebijakan dan “kesediaan membuat kebijakan untuk menerima pendirian, apapun sumbernya, bersama komitmen khusus terhadap masyarakat umum sebagai sumber pedoman”.⁵⁴

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 200.

Pada kondisi seperti ini, terjalin komunikasi yang menghubungkan publik dengan pembuat kebijakan. Komunikasi ini membentuk garis yang dapat menyalurkan preferensi kebijakan, keputusan, dan penerimaan atau penolakan. Maka, wajah opini publik menghiasi situasi ini. Menurut Dan Nimmo, setidaknya ada tiga bentuk wajah opini publik, yakni ungkapan dari warga negara yang populer, ungkapan dari massa atau satu warga negara yang simbolik, dan ungkapan dari sejumlah kepentingan khusus yang terorganisasi.

Dari ketiga modus pengungkapan opini ini banyak opini yang disebut, tetapi hanya sedikit (dan kadang-kadang hanya satu) yang dipilih dalam pembuatan kebijakan. Apa yang disebut “jumlah kecil” oleh Friedrich dalam proses perwakilan ini adalah pelaksanaan memilih oleh pembuat kebijakan; mereka bisa jadi memperhitungkan “keseluruhan warga negara” (barangkali opini rakyat atau opini massa) atau hanya “sebagian dari mereka” (berbagi publik dari opini). Di luar sumber-sumber opini publik yang diperhitungkan oleh mereka, apakah banyak, satu, atau sedikit, pembuat keputusan juga menginterpretasikan dan menetapkan isi opini.⁵⁵

Sementara itu, garis komunikasi dua arah yang menghubungkan opini publik dengan pembuat kebijakan publik mempunyai hubungan erat dengan komunikasi politik. Sebab, menurut Dan Nimmo, hubungan komunikasi politik dengan opini publik merupakan tingkat dan kondisi antara pikiran rakyat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pembuatan kebijakan publik juga mengandung konsekuensi. Sehingga, konsekuensi dalam urusan kebijakan yang saling lingkup ini, dapat menjalin garis-garis komunikasi yang menghubungkan pembuat kebijakan publik dengan opini yang satu, yang banyak, dan yang sedikit.

Lalu, bagaimana masyarakat bisa terbentuk dalam urusan kebijakan publik? Dan Nimmo menjawab pertanyaan tersebut dengan tiga jawaban. *Pertama*, orang bebas bertindak sebagai seorang individu yang memilih sendiri arah tindakannya dari berbagai

⁵⁵ Ibid.

pilihan; apabila pilihan tersebut berkonvergensi, maka hasilnya menjadi tatanan sosial. *Kedua*, pemimpin politik menyusun tatanan dengan menggunakan mekanisme control sosial agar anggota kelompok sesuai dengan garis tindakan yang identik. Dan *ketiga*, bahwa orang secara kolektif menegosiasikan makna bersama tentang segala sesuatu melalui transaksi mereka.⁵⁶

E. Teori Gerakan Sosial Baru

Para teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB) secara kontras memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologi, dan kultur sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif (collective actions), dan sumber-sumber lainnya tentang identitas, termasuk etnisitas, jender dan seks yang memaknai identitas kolektif. Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki terminologi yang berbeda tentang tindakan kolektif yang menggantikan asumsi-asumsi dari Gerakan Sosial Lama (Old Social Movement) tentang revolusi proletarian yang dihubungkan dengan Marxisme Klasik. Meskipun teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) merupakan reaksi kritik terhadap Marxisme Klasik, namun beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru berusaha meng-update dan merevisi asumsi-asumsi Marxis, sementara teoritis yang lainnya melakukan perubahan (Buechler, 1995: 442).⁵⁷

Menurut Pichardo (1997: 414), paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigm Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*). Karakteristik khusus dari Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dilihat dari Empat aspek, yakni:⁵⁸

- (1) *Ideology and goals* (Tujuan dan Ideologi);

⁵⁶ Dan Nimmo, Komunikasi Politik Khalayak dan Efek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 222.

⁵⁷ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016)., hal. 135

⁵⁸ Ibid.

Faktor sentral karakteristik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah pandangan ideologi yang berbeda. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) mencatat bahwa Gerakan sosial kontemporer merepresentasikan keterputusan dari gerakan era industrial. Bukan memfokuskan pada redistribusi ekonomi (seperti yang dilakukan gerakan kelas-pekerja), Gerakan Sosial Baru (GSB) menekankan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup (quality of life and life-style concerns).⁵⁹

(2) *Tactics* (Taktik);

Taktik dari Gerakan Sosial Baru merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gerakan Sosial Baru lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu (disruptive tactics) dan memobilisasi opini publik (mobilizing public opinion) untuk mendapatkan pengaruh politik. Mereka juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum (costumes and symbolic representations).

(3) *Structure* (Struktur);

Sikap anti-institusi dari Gerakan Sosial Baru juga meluas kepada cara mereka mengatur. Gerakan Sosial Baru berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintahan yang mereka inginkan. Yaitu, mereka mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku yang menghindari bahaya oligarki. Mereka cenderung melakukan rotasi kepemimpinan, suara umum dalam semua isu, dan memiliki organisasi sementara yang tidak permanen. Mereka juga mendukung sikap anti-birokrasi, berdebat melawan dengan apa yang mereka anggap karakter

⁵⁹ Ibid.

dehumanisasi dari birokrasi modern. Sehingga, mereka menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap individu; terbuka, desentralis, dan non-hierarkis (Zimmerman, 1987).

(4) *Participants of contemporary movements* (Partisipan dari Gerakan Kontemporer).

Terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru. Basis pertama dukungan dari kelas menengah baru, yakni sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pasca-industri membangun basis dukungan partisipan Gerakan Sosial Baru. Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan Gerakan Sosial Baru adalah ideologi, bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas. Mereka didefinisikan oleh nilai-nilai umum daripada struktur lokasi.⁶⁰

Pada dasarnya, Gerakan Sosial Baru bersifat plural. Menurut Melucci (1980), Cohen (1985), Slater (1985) dan Touraine (1985), ekspresi New Social Movements (NSMs) bergerak dari anti-rasialisme, anti-nukliarisme, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalism dan etnisitas, kebebasan sipil dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modernitas menuju masyarakat pasca modernitas merefleksikan terjadinya perubahan bentuk dair gerakan sosial dari bentuk lama kepada bentuk Gerakan Sosial Baru. Dengan kata lain, terjadinya perubahan bentuk masyarakat berhubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dari gerakan sosial.

⁶⁰ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatannya berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Tahapan ini sangat penting diikuti oleh para peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian.⁶¹ Sebab, hasil penelitian akan sangat dipengaruhi melalui tahapan-tahapan tersebut.

Dalam metode penelitian, penelitian kerap dilatarbelakangi oleh tiga hal. *Pertama*, penelitian menambah atau mengembakan pengetahuan yang baru. *Kedua*, penelitian akan memudahkan pekerjaan lebih efektif, sehingga kinerjanya lebih meningkat. *Ketiga*, hasil penelitian bisa digunakan pembuat kebijakan publik untuk memperbaiki beragam masalah yang ada. Barang tentu, dalam menyusun penelitian, memerlukan proses maupun metode yang matang, agar menghasilkan hasil penelitian yang maksimal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode jenis penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic (utuh). Dimana dalam penelitian ini tidak diperbolehkan mengasingkan individu atau organisasi ke dalam variabel, tetapi perlu

⁶¹ Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Grasindo, 2010). Hlm. 3

melihatnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.⁶² Penelitian deskriptif ini dipilih lantaran data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar. Apabila terdapat angka, sifatnya hanya sebagai pelengkap data.

Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut bisa diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape dan dokumen resmi lainnya. Dalam pendekatan deskriptif ini penulsi harus bisa menelaah setiap bagian yang ada sehingga penulis tidak akan dengan mudah menerima keadaan yang ditelitinya begitu saja melainkan penulis mempunyai daya kritis terhadap objek penelitiannya.⁶³ Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga bisa diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁶⁴

Gambaran yang sesuai fakta ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan penelitian yang lebih akurat. Salah satunya dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis juga memungkinkan untuk mendapatkan data lebih leluasa. Sehingga, penulis dapat mengeksplorasi data lantaran, data yang didapatkan lebih jujur dan akurat. Kemudian, penulis dapat menciptakan daya kritisnya terhadap objek penelitian yang sedang disusun. Tidak hanya itu, tambahan informasi lain juga bisa menggambarkan hasil penelitian dengan mudah. Lantaran memiliki data yang lebih komprehensif.

⁶² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2014). Hlm.

4

⁶³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2014). Hlm.

11

⁶⁴ Raden Mas Jerry Indrawan, "Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat," *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi hal yang krusial, lantaran lokasi menjadi pusat guna mendapatkan data beragam yang lebih akurat. Namun, karena pandemic Covid-19 makin menjadi-jadi. Sehingga penulis lebih banyak meneliti melalui daring, dengan wawancara melalui WhatsApp, email, serta mengamati media.

Kendati begitu, penulis juga melakukan penelitian secara langsung di Gejayan, Yogyakarta. Mulanya, pada 1946 Gejayan adalah salah satu nama kelurahan di Yogyakarta yang tergabung menjadi Desa Condongcatur. Ada tiga kelurahan lain yakni Kelurahan Manukan, Kelurahan Gorongan dan Kelurahan Kentungan. Namun, sekarang area Gejayan juga dikenal dengan Jalan Affandi.

Lebih dari itu, Gejayan bukan hanya sebuah nama kelurahan. Tetapi, sebagai saksi sejarah dalam memperjuangkan demokrasi. Mulai dari aksi demonstrasi 1998 sampai pada aksi Gejayan Memanggil sekarang. Gejayan yang juga dikelilingi oleh universitas memudahkan untuk menggerakkan massa dan mengumpulkannya.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan oleh penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

6. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang didapat langsung dari tempat penelitian, biasanya meliputi tiga hal yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan anggota aktif Aliansi Rakyat Bergerak atau yang dikenal sebagai Gejayan Memanggil. Data yang diperoleh dari sumber primer ini

⁶⁵ Muharto dan Arisandy Ambarita, Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.82

masih belum matang, sehingga penulis perlu mengolahnya agar dapat tersusun secara rapi.

7. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bentuk sumber data sekunder data dapat berupa berkas dari lembaga terkait, buku-buku, video, internet, dari berita media massa dan data-data yang bersifat menunjang peneliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang termasuk sumber sekunder yakni hasil kajian Omnibus Law yang disusun oleh Gejayan Memanggil, RUU Omnibus Law, peneliti dapatkan dari skripsi, jurnal, media mainstream, media baru, dan lain sebagainya.

8. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memahami mengenai apa yang sedang diteliti. Lebih tegas, Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁶⁷

Melalui kriteria tersebut, penulis mengambil objek orang yang terlibat langsung dalam proses mengkomunikasikan pesan politik Gejayan Memanggil kepada pemerintah maupun masyarakat. Salah satu informannya bahkan sudah mengikuti gerakan selama 10 tahun. Dalam Gejayan Memanggil hanya ada divisi

⁶⁶ Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi. (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm. 8

⁶⁷ Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). Hlm.

yang masing-masing memiliki tugas berbeda tanpa memiliki pemimpin. Namun, dalam kerjanya, divisi tersebut memiliki kedudukan yang sama dan saling berkoordinasi.

No	Nama Divisi	Tugas
1	Divisi Acara	Memperluas jaringan
2	Divisi Humas	Berkaitan dengengan produksi wacana
3	Divisi Kajian	Mengkaji isu yang akan diangkat
4	Divisi Agitasi dan Propaganda	Menyipkan bahan materi untuk mengomunikasikan hasil kajian kepada publik
5	Divisi Keamanan	Menjaga keamanan
6	Divisi Medis	Menyiapkan P3K
7	Divisi Perlengkapan	Mempersiapkan peralatan aksi

Tabel 1.1 Daftar divisi Gejayan Memanggil

Selain itu, Gejayan Memanggil juga membebaskan siapa saja boleh masuk dan terlibat sesuai kemampuan dan ketertarikannya. Namun, dalam penelitian ini subjek yang masuk kriteria penelitian penulis adalah perwakilan dari divisi humas dan kajian. Kedua informan ini dipilih lantaran dapat merepresentasikan Gejayan Memanggil. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian sebagai berikut:

No	Nama Informan	Peran
1	Gendis Syari Widodari	Divisi Humas
2	Ardi Syihab	Divisi Kajian

Tabel 1.2 Daftar informan

Dalam penentuan subjek, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam teknik purposive sampling ini bisa beragam dan bergantung pada kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, objek yang dimaksud adalah Gejayan memanggil. Sehingga, subjek yang ditentukan pun anggota aktif dari Gejayan Memanggil.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses untuk memperoleh data untuk menyelesaikan penelitian dengan pengumpulan data dan jadi data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai cara: wawancara, observasi, dokumen. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi (triangulation). Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Penggunaan triangulasi sangat membantu, tetapi sekaligus juga sangat mahal. Dalam banyak penelitian kualitatif, peneliti umumnya menggunakan teknik triangulasi dalam arti menggunakan interview dan observasi.⁶⁸

Metode ini juga menuntut peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mendalam, sebab kredibilitas peneliti diuji dalam hal ini. Peralnya, untuk mendapatkan data seperti wawancara, itu membutuhkan pengetahuan yang bagus dalam menyusun beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Selain itu, ketelitian dan kejelian peneliti juga berpengaruh pada saat pengumpulan data melalui observasi sekaligus dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan cara triangulation dalam memperoleh data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁶⁸ Dr.J.R. Raco, M.E., M. Sc. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan keunggulan, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 111.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang menggunakan secara lisan dan tatapan muka terhadap responden. Wawancara dengan metode kualitatif ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan wawancara yang dilakukan yaitu seperti wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka.⁶⁹ Namun, karena pandemic Covid-19 masih belum usai, penulis mengumpulkan data dan informasi lebih banyak secara daring. Yakni menghubungi informan melalui WhatsApp, E-mail, maupun media sosial lainnya. Selain itu, wawancara juga memuat pertanyaan yang disusun oleh peneliti lalu diberikan kepada informan.

Ada dua jenis pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dalam kebanyakan studi tentang komunikasi politik dan opini publik, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka menimbulkan masalah umum, tetapi dalam pertanyaan itu sendiri tidak menyarankan struktur apa pun bagi jawaban subjek. Sebaliknya, pertanyaan tertutup menggunakan kuesioner yang merinci dengan jawaban alternative sehingga memilih di antara pilihan itu. Pertanyaan jenis ini menuntut jawaban yang relative mudah dapat dibandingkan dengan jawaban seluruh subjek.⁷⁰

Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih kaya, penulis menggunakan jenis pertanyaan tertutup melalui wawancara langsung secara daring kepada informan. Selain mendapatkan data dan informasi yang dapat diolah oleh penulis, hal ini juga mampu membuat informan mengeksplorasi jawaban dari pertanyaan yang penulis ajukan. Sehingga, wawancara dapat

⁶⁹ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode penelitian kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal.176

⁷⁰ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 250.

berlangsung lancar dan menciptakan suasana nyaman untuk informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada salah satu dari masing-masing divisi Gejayan Memanggil.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini dalam bukunya Afifuddin Saebani, observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara terperinci dan sistematis semua unsur yang ada dalam objek penelitian.⁷¹ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara langsung turun ke lapangan. Sehingga, data yang didapatkan akan lebih akurat. Selain itu, penulis juga mengamati objek penelitian dari Gejayan Memanggil agar mendapatkan data yang lebih banyak. Sehingga, informasi yang didapatkan akan maksimal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian ini, arsip-arsip dan juga literatur lainnya. Di sini, peneliti bukan sekadar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip tetapi mencari makna yang tersirat di dalamnya, untuk itu peneliti dituntut untuk bersikap kritis, analitis dan teliti.⁷²

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari hasil kajian yang Gejayan Memanggil susun mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data lain dari literatur lain seperti skripsi, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya, penulis juga memperhatikan media yang

⁷¹ Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hal.88.

⁷² Skripsi Aida Nursanti, Pola Komunikasi Politik Masyarakat Transisi pada Pemilu 2010 (Studi kasus tentang pola pengaruh Komunikasi Politik dalam membentuk Perilaku memilih masyarakat transisi di Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura pada Pemilu 2010), 30 November 2010, hlm 64.

memberitakan Gejayan Memanggil.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992:12) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak memiliki patokan yang jelas dan tegas, oleh karena itu dapat terjadi munculnya pendapat pribadi yang tidak berdasarkan data. Analisis data kualitatif lebih merupakan kiat serta mengandalkan intuisi peneliti. Sehingga perlu dilakukan analisis data kualitatif melalui tiga jalur kegiatan secara serentak untuk mengatasi ketidaktegasan tersebut, dan dituangkan dalam model analisis interaktif.⁷³ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Berikut ini adalah bagan model analisis interaktif yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

Dalam analisis yang dilakukan secara terus-menerus tentu akan menghasilkan data yang sangat kompleks, sehingga perlu melalui tahapan reduksi data, maksudnya yaitu penulis melakukan analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data untuk bisa diambil sebuah kesimpulan. Dalam proses ini penulis bisa terlebih dahulu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu untuk menemukan makna dari data yang didapat.⁷⁴

2. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data kualitatif biasanya untuk lebih mempermudah pembaca disajikan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain. Apabila data disajikan dengan lebih sistematis maka

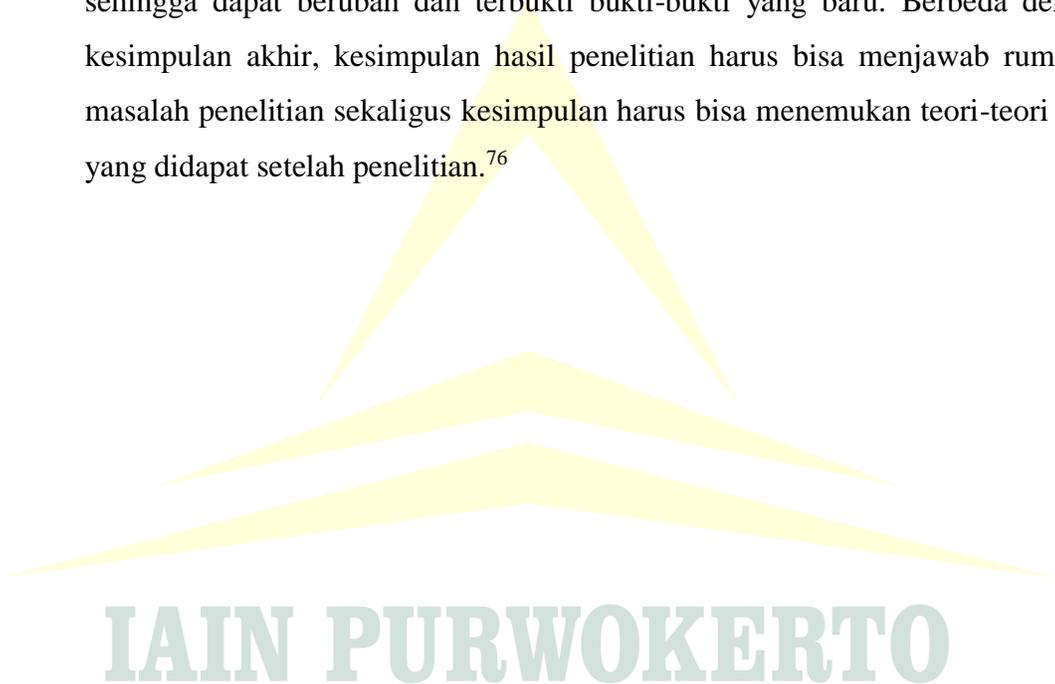
⁷³ Yulie Apsari, “Implementasi Standar Proses untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran :Studi Kasus pada SMP Negeri 19 Jakarta”, thesis, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hal. 73.

⁷⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal.124.

pembaca akan lebih bisa memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan dari masing-masing pola atau kategori.⁷⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis ini yaitu pengambilan keputusan atau melakukan verifikasi. Apabila pada kesimpulan awal sifatnya masih sementara sehingga dapat berubah dan terbukti bukti-bukti yang baru. Berbeda dengan kesimpulan akhir, kesimpulan hasil penelitian harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus kesimpulan harus bisa menemukan teori-teori baru yang didapat setelah penelitian.⁷⁶



IAIN PURWOKERTO

⁷⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik.....hal.124.

⁷⁶ Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik.....hal.124.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Gejayan Memanggil

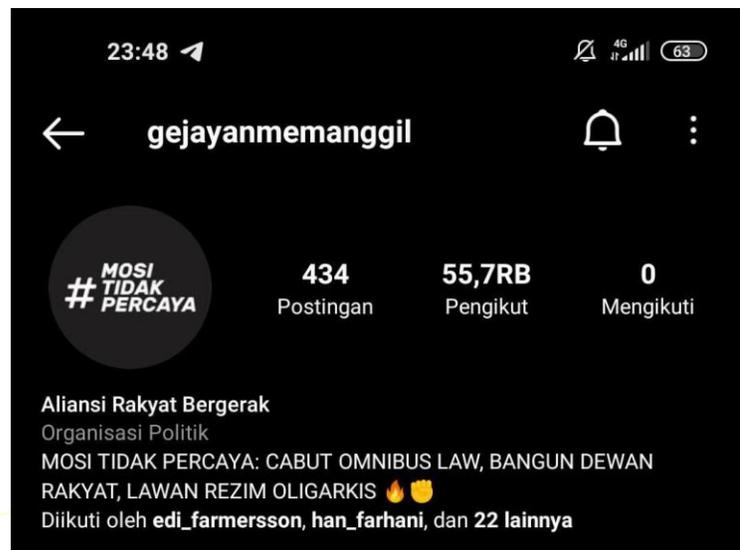
Gejayan Memanggil merupakan agenda aksi demokrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Bergerak. Aliansi ini berisi mahasiswa Yogyakarta dan masyarakat sipil sekitar Yogyakarta lainnya. Melalui tagar #GejayanMemanggil, aksi demonstrasi ini dijadikan sebagai respons kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan dianggap mengancam demokrasi di Indonesia. Salah satu isu yang disorot waktu itu mengenai RUU KUHP dan UU KPK.

Mulanya, Gejayan Memanggil dibentuk melalui sekumpulan mahasiswa dengan jumlah 20 orang yang kerap mengadakan diskusi-diskusi informal. Ide awal pembentukan Gejayan Memanggil merupakan kebutuhan respons dari kebijakan negara yang dinilai tergesa-gesa, tidak transparan, dan merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah serta kelompok marjinal. Selanjutnya, isu yang menggerakkan terbentuknya Gejayan Memanggil juga menjadi landasan agenda demokrasi ini lahir. Ada beragam isu yang menjadi landasan lahirnya Gejayan Memanggil, yakni:⁷⁷

Pertama, polarisasi Pilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pilpres melahirkan dua kubu yang sangat terpolar. Ada anggapan biner bahwa masyarakat sipil hanya terbagi menjadi dua; cebong dan kampret. Mereka yang mengafirmasi tindakan pemerintah adalah cebong, dan yang mengkritik pemerintah adalah kampret. Padahal banyak elemen masyarakat yang tidak dapat direpresentasikan kepentingannya oleh dua kubu tersebut.

⁷⁷ Wawancara dengan Gendis Syari sebagai Divi Humas Aliansi Rakyat Bergerak pada Jumat 25 Juni 2021.

Bahkan, kampret sebagai oposisi dinilai tidak mampu membawa narasi-narasi progresif untuk menandingi dominasi pemerintah. Maka, Aliansi Rakyat Bergerak menganggap bahwa ada urgensi untuk membuat blok sipil baru, yaitu blok ketiga, yang coba dibawa oleh Gejayan Memanggil dengan narasi Mosi Tidak Percaya terhadap Elit Politik dan Ekonomi. Narasi ini juga nampak dari foto profil Instagram Aliansi Rakyat Bergerak. Dapat dilihat gambar di bawah ini:



Gambar 1.4 Layar Tangkap akun instagram Aliansi Rakyat Bergerak

Kedua, sejarah Gejayan. Gejayan adalah salah satu nama kelurahan di Yogyakarta yang tergabung menjadi Desa Condongcatur. Ada tiga kelurahan lain yakni Kelurahan Manukan, Kelurahan Gorongan dan Kelurahan Kentungan. Sekarang area Gejayan juga dikenal dengan Jalan Affandi. Gejayan ini bukan hanya sekadar salah satu kelurahan di Yogyakarta, tetapi memiliki sejarah aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 1998 silam yang begitu banyak memakan korban jiwa.

Salah satu korban aksi demonstrasi tersebut adalah mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang bernama Moses Gatotkaca. Moses meninggal dalam aksi demonstrasi 1998 silam ketika menuntut Presiden Soeharto turun. Moses ditemukan sekitar pukul 21:00 WIB di tengah jalan dengan tangan patah dan melingkar ke belakang. Namun, saat petugas medis akan membawa Moses ke Rumah Sakit Panti Rapih, ia meninggal di ambulans.

Sejarah Gejayan ini menjadi salah satu alasan penempatan lokasi demonstrasi. Sebab, Gejayan menjadi lokasi aksi demonstrasi terbesar di Yogyakarta. Selain itu, Aliansi Rakyat Bergerak juga memiliki keinginan untuk mengubah wajah Gejayan yang penuh duka ketika dikaitkan dengan demonstrasi, menjadi perlawanan inklusif dan suka cita. Selain itu, lokasi Gejayan juga dianggap cukup strategis, melihat banyaknya kampus yang bisa dijadikan titik kumpul dan zona evakuasi.

Ketiga, aksi daerah. Aliansi Rakyat Bergerak berpendapat bahwa gerakan sipil selama ini dinilai sangat terpusat di Jakarta. Ketika demonstrasi RUU KPK (sekarang sudah jadi Undang-Undang), aksi Jakarta menjadi aksi satu-satunya yang disorot oleh media dan lainnya. Sebagai solidaritas kepada peserta demonstrasi di Jakarta, membuat narasi perlawanan menjadi satu Indonesia, sekaligus menjadi pemicu masyarakat di daerah lain, Gejayan Memanggil hadir.

Setelah diskusi dan menentukan landasan di atas, Gejayan Memanggil melakukan konsolidasi. Kesadaran bahwa ada banyak elemen masyarakat yang terdampak, maka sekumpulan mahasiswa ini membangun jejaring dengan menggandeng beragam elemen, seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO), mahasiswa, akademisi kampus, pekerja sektoral (formal maupun informal), serta masyarakat umum.

Dari konsolidasi tersebut, lalu dirumuskan bentuk respon seperti apa yang ingin diberikan. Setelah mendapatkan respons, Gejayan Memanggil lahir dengan

metode aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi Gejayan Memanggil 1 pada 23 September 2019, Gejayan Memanggil melayangkan tujuh tuntutan. Tujuh tuntutan tersebut yakni: a. Menggugat RKUHP; b. Kedua, pelemahan posisi KPK; c. Kriminalisasi Aktivis; d. Isu Lingkungan, Pembakaran Hutan dan Tambang; e. RUU Ketenagakerjaan Yang Tidak Berpihak Pada Rakyat; e. Problematika RUU Pertanahan; dan e. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Belum Ditetapkan.

Selanjutnya, setelah konsolidasi Gejayan Memanggil membuat tuntutan untuk aksi lanjutan yang digelar pada 21 September 2019. Aksi yang dikenal sebagai Gejayan Memanggil Jilid Dua, Aliansi Rakyat Bergerak melayangkan sembilan tuntutan. Dilansir dari Tirto.id, sembilan tuntutan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
- b. Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.
- c. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan, serta cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bari perusahaan besar perkebunan.
- d. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK.
- e. Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
- f. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- g. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

- h. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba.
- i. Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.

2. Pola Polisentrisme Gejayan Memanggil

Politik pasca Orde Baru merefleksikan logika dan mekanisme ‘politik baru’ bagi masyarakat (dan elit) di semua level kepolitikan. ‘Politik baru’ menggambarkan resistensi terhadap ‘politik lama’ yang otokratik, represif, dan memusat (sentralisme). Interpretasi atas ‘politik baru’ juga dipahami sebagai lahirnya polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi. Polisentrisme diartikan secara sederhana sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk menolak gagasan (atau penguasa) lama yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka.⁷⁸

Dalam gerakan Gejayan Memanggil, Aliansi Rakyat Bergerak juga mengadopsi pola polisentrisme. Sebab, tidak ada tatanan struktural layaknya seperti organisasi; memiliki ketua, bendahara, atau sekretaris. Sejak awal Gejayan Memanggil bersifat leaderless. Artinya, Gejayan Memanggil tidak memiliki pemimpin yang terpusat dalam gerakan. Namun, hanya ada divisi-divisi yang memiliki kedudukan sama dan saling terkoordinasi. Serta dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat koordinator lapangan sebagai pusat informasi.

Ada lima divisi di dalam Gejayan Memanggil. Divisi-divisi ini meliputi: 1) Acara (dan jejaring); 2) Humas (di dalamnya juga ada Media dan Kajian); 3) Agitasi dan Propaganda; 4) Keamanan; 5) Medis. Gejayan Memanggil juga

⁷⁸ Wen Ting Shen et al., “Cloud Storage Integrity Checking Scheme with Private Key Recovery Capability,” *Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software* 27, no. 6 (2016): 1451–1462.

sangat terbuka dalam hal ini, tidak ada syarat atau ketentuan yang harus dimiliki agar bisa bergabung ke dalam gerakan Gejayan Memanggil.

Upaya ini merupakan hasil adopsi Gejayan Memanggil terhadap pola polisentrisme. Pasalnya, Aliansi Rakyat Bergerak melihat tidak ada relevansi adanya pemimpin atau struktur kepemimpinan atau komando apapun untuk menghindari dua hal; 1) penokohan terhadap aktor-aktor tertentu (mengingat pelajaran 1998 silam); 2) gerakan menjadi terlalu birokratis ketimbang substantif.⁷⁹

Selain itu, upaya menghindari penokohan juga menjadi salah satu upaya keamanan. Sebab, apabila tokoh yang dianggap merepresentasikan gerakan keluar dari barisan, maka gerakan tersebut akan mudah digembosi. Kemudian, penyerangan terhadap tokoh ini akan lebih mudah, lantaran menggunakan nama asli. Pasalnya, tokoh yang kontra terhadap pemerintah kerap mendapatkan serangan-serangan. Mulai dari jeratan pasal, sampai serangan siber.

3. Konsep Gejayan Memanggil dalam Pengorganisasian Massa

Dalam pengorganisasian massa, Gejayan Memanggil menggunakan dua medium, yakni melalui daring dan luring. Secara luring, yang sudah bergabung ke dalam Gejayan Memanggil mengajak setiap organisasi atau perseorangan yang dikenal untuk mendiskusikan persoalan negara secara kolektif. Kemudian, masing-masing organisasi atau perseorangan diajak berkumpul. Apabila tertarik dengan isu yang diangkat, maka akan dilibatkan secara langsung ke dalam gerakan Gejayan Memanggil.

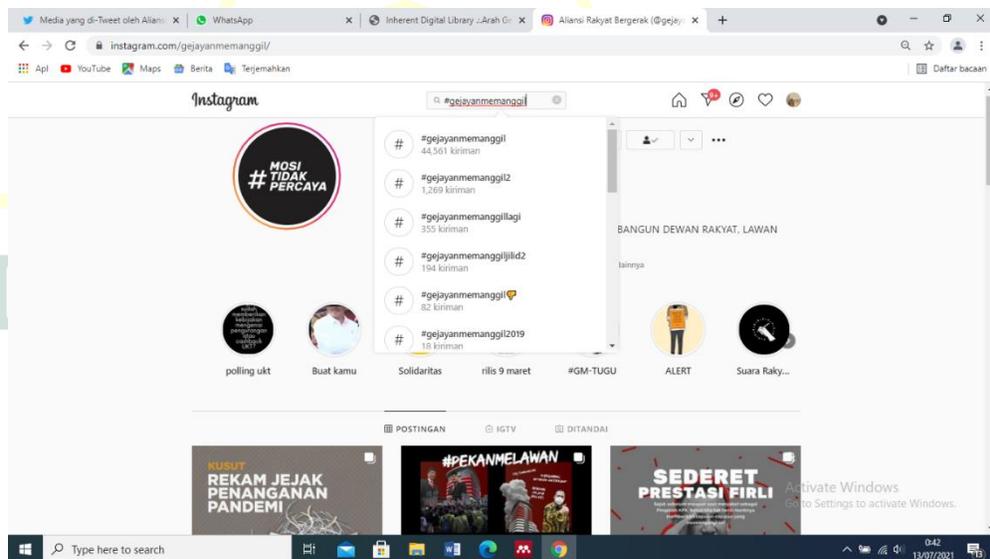
Sementara secara daring, Gejayan Memanggil memetakan elemen masyarakat Yogyakarta sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.

⁷⁹ Wawancara dengan Gendis Syari sebagai Divisi Humas Gejayan Memanggil pada Jumat, 25 Juni 2021.

Hal ini dianggap cukup menarik, lantaran pemetaan yang dilakukan secara detail, menghasilkan bahasa dan symbol komunikasi Gejayan Memanggil dianggap sangat berhubungan. Hasil pemetaan ini selanjutnya diterapkan dengan sistem personalized campaign melalui tagar #GejayanMemanggil.

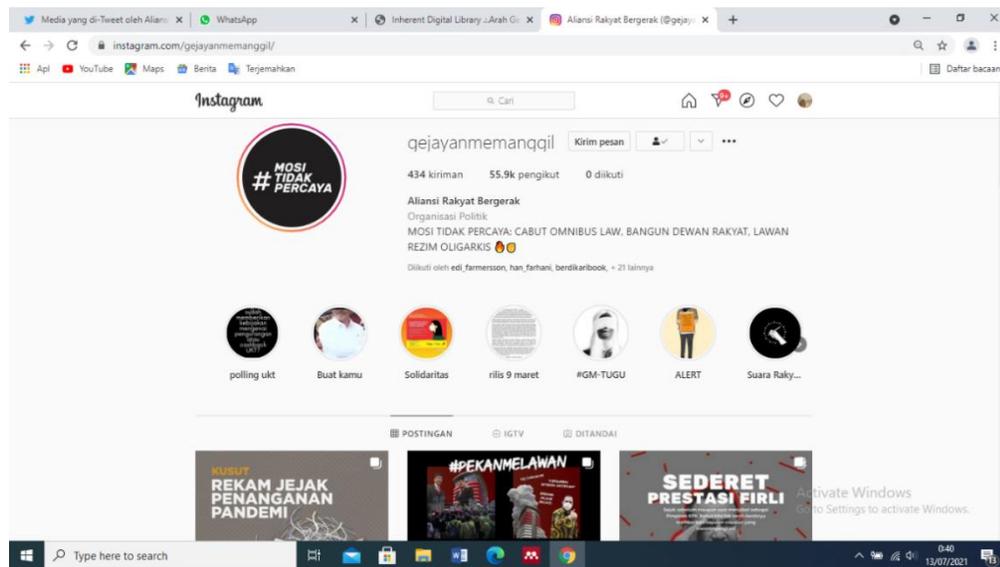
Artinya, setiap personal semua orang dapat berkontribusi untuk menyampaikan pesan, mengangkat isu yang ingin mereka angkat dengan bahasa dan audiens mereka sendiri. Upaya berkontribusinya pun hanya dengan menuliskan tagar #GejayanMemanggil di setiap unggahan. Sehingga, tagar tersebut dapat tersebar lalu memicu setiap audiens yang membacanya. Dalam hal ini, komunikasi intrapersonal yang sangat intim terjadi di ruang digital dengan konten-konten yang nampak amat dekat.

Banyaknya yang membuat tagar #GejayanMemanggil di Instagram bisa dilihat di bawah ini:



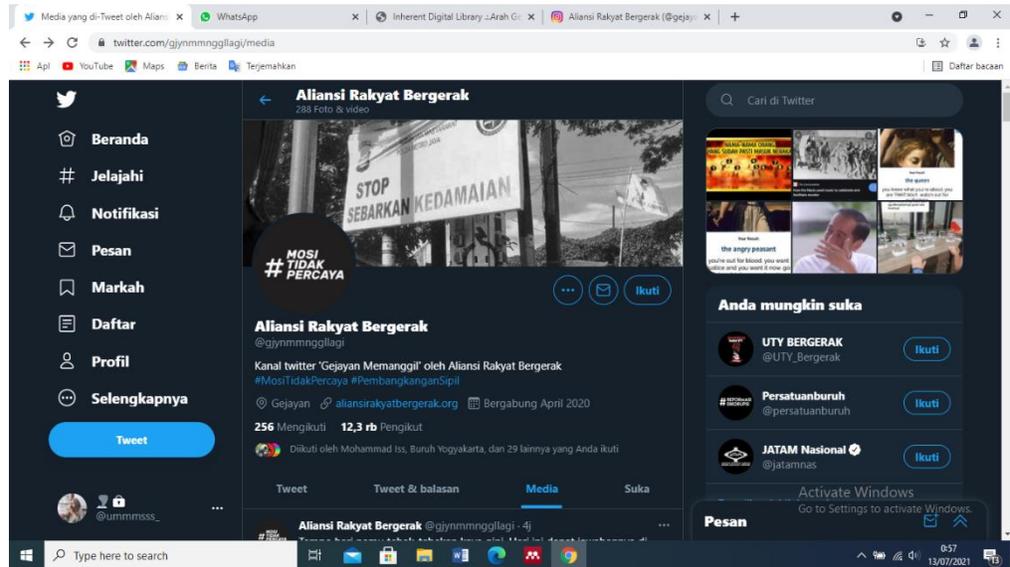
Gambar 1.5 tangap layar tagar #GejayanMemanggil

Banyaknya pengikut akun Instagram Gejayan Memanggil juga memudahkan isu yang diangkat lebih menyebar. Selain itu, Aliansi Rakyat Bergerak juga aktif mengunggah isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan. Sehingga, sampai hari ini, unggahan Gejayan Memanggil sudah mencapai 432 kiriman. Bisa dilihat dari hasil tangkap layar di bawah ini:



Gambar 1.6 tangkap layar akun Instagram Gejayan Memanggil

Berbeda dengan Instagram, twitter lebih banyak menampilkan hasil tagar yang bervariasi; ada banyak meme, jokes, bahkan laporan berupa kondisi dan situasi dari aksi Gejayan Memanggil saat itu. Rasionalitas solidaritas Gejayan Memanggil menghadirkan titik temu antara budaya populer dengan kesadaran politik. Kendati tidak memiliki pengikut sebanyak di Instagram, kanal Twitter Aliansi Rakyat Bergerak juga cukup memiliki banyak pengikut. Dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1.7 layar tangkap kanal Twitter Gejayan Memanggil

Sebagai gerakan aksi demonstrasi, Aliansi Rakyat Bergerak mampu bergerilya secara daring maupun luring. Bahkan, #GejayanMemanggil juga berhasil mengumpulkan massa lebih banyak. Sebab, pesan tersebut lebih mudah sampai pada khalayak. Terlihat dari pengaruh kekuatan pesan yang disampaikan oleh Gejayan Memanggil melalui akun media sosial mereka. Hal ini terjadi lantaran media sosial dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku politik melalui pesan-pesan yang disampaikan.

Dalam sebuah artikel bertajuk *When young people get involved in online communities, it leads them toward politics* (2016), Benjamin Bowyer dan Joseph Kahne memaparkan bahwa anak muda yang sering berada dalam komunitas daring lebih mungkin untuk ikut serta perbincangan politik. Ini dimungkinkan sebab banyaknya diskusi daring yang bersinggungan dengan perbincangan politik.

Perbincangan politik ini muncul sebab adanya faktor minat seseorang yang berpengaruh dalam ketertarikannya.⁸⁰

Dalam mengikuti aksi demonstrasi, tentunya seseorang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu *friendship-driven* dan *interest-driven*. Kelompok *friendship-driven* adalah kelompok mahasiswa yang mengikuti demonstrasi semata-mata dikarenakan faktor lingkungan (ajakan teman, propaganda, dan orang tua). Sedangkan, kelompok *interest-driven* adalah kelompok mahasiswa yang mengikuti demonstrasi dikarenakan adanya kemauan pribadi dan adanya ketertarikan terhadap isu yang dibawakan.⁸¹

Namun, media sosial memiliki kekuatan yang dapat mengubah *friendship-driven* menjadi *interest-driven* dalam kesadaran berperilaku politik. Hal ini terjadi lantaran konten-konten yang memuat politik terus dibagikan di aktivitas media sosialnya. Sehingga, aktivitas tersebut dapat memicu perubahan motivasi seseorang untuk mengambil keputusan berperilaku politik. Hal inilah yang membuat Gejayan Memanggil mampu mengorganisasi massa.

Gejayan Memanggil dalam mengorganisasi massa merupakan hasil proses komunikasi massa yang ideal. Dimana sebagai komunikator, Gejayan Memanggil dapat menyampaikan pesan secara menyeluruh dengan baik melalui media sosial, sehingga dapat diterima oleh komunikan yakni masyarakat sipil lainnya. Penyebaran informasi ini melalui hasil kajian, meme, jokes, dan lainnya.

4. Omnibus Law dalam Isu Komuniasi Politik

Sejak awal kemunculan Omnibus Law Cipta Kerja, regulasi ini sangat problematik. Ada banyak persoalan yang disorot. Setidak-tidaknya, persoalan ini begitu dekat dengan komunikasi politik. Peralnya, terjadi komunikasi politik

⁸⁰ Terhadap Perilaku Politik, "Jurnal KSM Eka Prasetya UI , Desember 2019 Volume 1, Number 1" 1, no. 1 (2019): 1–23.

⁸¹ Ibid.

yang begitu intens kepada para pembuat kebijakan, tetapi tidak secara terbuka mengomunikasikannya kepada publik. Sehingga, menjadi lumrah apabila muncul gerakan massa yang menolak regulasi ini dan membentuknya sebagai wajah opini publik.

Salah satu persoalan yang dekat komunikasi politik adalah Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja. Persoalan ini juga menjadi salah satu di antara dua belas alasan kenapa menolak Omnibus Law Cipta Kerja versi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). FRI ini merupakan gerakan masyarakat sipil yang melibatkan banyak organisasi, lembaga, maupun individu. Barang tentu, Gejayan Memanggil juga terlibat dalam penyusunan penolakan ini.

Dalam Kertas Posisi yang disusun oleh FRI. Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja (yang disebut sebagai RUU Cilaka) mengalami cacat prosedur. Hal ini tidak lain lantaran banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik secara komprehensif dan parsial. Ada tiga alasan FRI yang menguatkan argument ini, yakni:

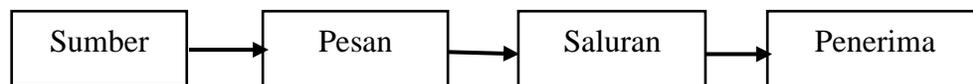
Pertama, proses penyusunan RUU Cilaka sangat mencederai hak partisipasi masyarakat. *Kedua*, terdapat banyak pasal inkonstitusional dan aturan kolonial yang didaur ulang dalam RUU Cilaka. *Ketiga*, kesimpulan dari proses dilakukan secara tertutup, sosialisasi dadakan alias abal-abal, demikian pula pelibatan BIN dan Polri menunjukkan bahwa pemerintah mencederai demokrasi. Jika upaya pemerintah tersebut dibiarkan, akan membuka kesempatan berkuasanya rezim otoriter.⁸² Ada dua poin yang sangat dekat dengan komunikasi politik yakni poin pertama dan poin ketiga. Pada poin partisipasi masyarakat nampak terjadi proses komunikasi yang tidak ideal. Pasalnya, pembuat Omnibus Law hanya melibatkan Lembaga Eksekutif, Satuan Tugas (Satgas), Lembaga

⁸² Kertas Posisi, "12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (# Cilaka12)" (2020).

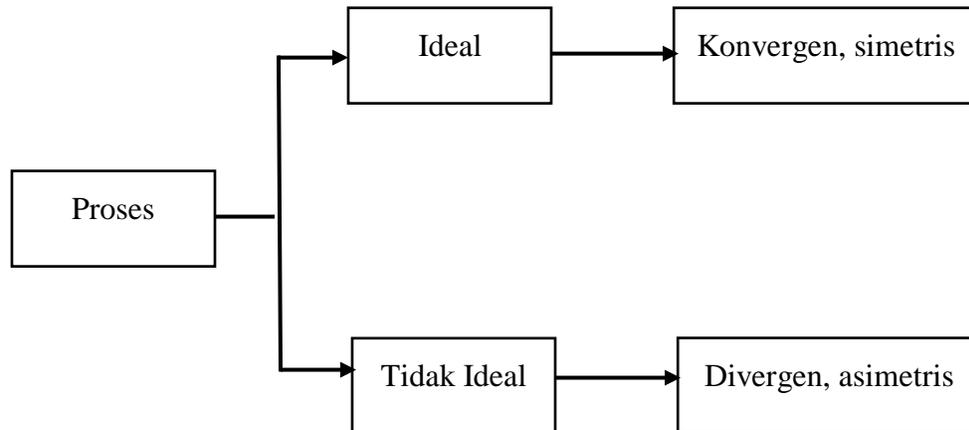
Legislatif, Partai Politik dan Pengusaha. Namun, tidak melibatkan masyarakat sipil atau kaum marjinal.

Padahal, dalam komunikasi politik ada unsur suprastruktur dan infrastruktur yang semestinya saling berkomunikasi dalam bentuk koordinasi sehingga dapat terkonvergensi. Jika dilihat dari penyusunan Omnibus Law, maka yang masuk ke dalam unsur suprastruktur adalah Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Satuan Tugas. Sementara unsur infrastruktur mencakup partai politik dan pengusaha. Padahal, ada banyak kelompok yang masuk ke dalam unsur infrastruktur, namun tidak dilibatkan.

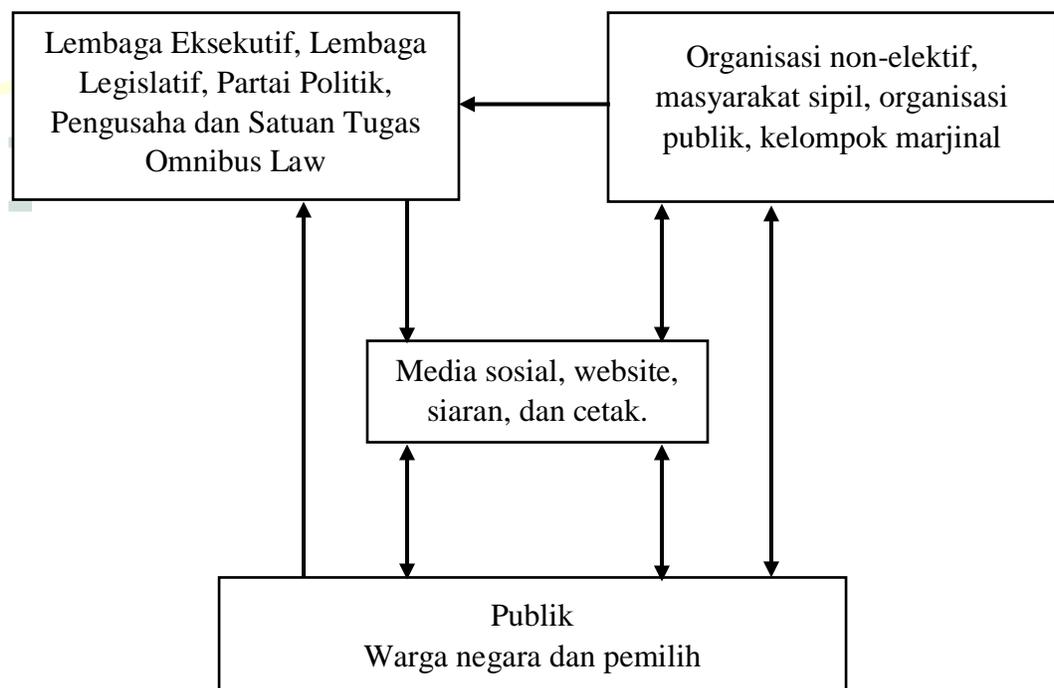
Kedua unsur tersebut juga sesekali dapat menjadi komunikator atau berganti menjadi komunikan. Maka, dalam paradigma komunikasi politik ada dua yakni linear (satu arah) dan konvergensi (dua arah). Paradigma ini juga dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi. Secara normal, bentuk pola komunikasi klasik akan digambarkan seperti ini:



Oleh karena itu, dalam paradigma konvergen akan membuat komunikator dan komunikan memiliki posisi yang sederajat. Sehingga, dalam komunikasi akan terjadi timbal balik antara penerima dan sumber komunikasi. Sementara pada paradigma divergen, menempatkan komunikator dan komunikan tidak sederajat. Maka, tidak ada timbal balik dari masyarakat luas terhadap penguasa. Jika digambarkan, akan seperti tabel di bawah ini:



Jika diimplementasikan pada proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja, maka yang terjadi adalah paradigma divergen. Sebab, dominasi elit politik dalam proses kebijakan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang minim dalam menentukan agenda kebijakan pemerintah. Sehingga, hanya terjadi komunikasi satu arah, yakni kepada sesama pejabat dan elit ekonomi. Akibatnya, masyarakat memiliki dampak seperti sulitnya dalam memperjuangkan kepentingan. Sehingga, kebijakan yang dibuat juga akan timpang dan tidak *check and balance*.



Gambar di atas juga sekaligus menggambarkan mengenai poin ketiga, bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh penyusun Omnibus Law tidak terbuka. Mereka langsung melakukan komunikasi kepada media, dan tidak melakukan komunikasi timbal balik kepada kelompok infrastruktur yang mencoba untuk menyampaikan aspirasinya. Maka, yang kelompok ini lakukan adalah menumpahkan aspirasinya melalui media. Sebab, melalui media mereka akan mendapatkan umpan balik.

Kondisi tersebut secara teoritis pada prinsipnya menjadi masalah dalam proses kebijakan di negara-negara berkembang saat ini. Sebagaimana disebutkan Osman (2002) bahwa di negara berkembang (seperti halnya di Indonesia), proses kebijakan cenderung bersifat elitis dan tidak menggambarkan proses yang responsive.⁸³

5. Pandangan Gejayan Memanggil pada Omnibus Law Cipta Kerja

Pandangan Gejayan Memanggil terhadap Omnibus Law Cipta Kerja didokumentasikan melalui dua kajian yang dirilis dengan tenggat waktu berbeda; kajian pertama bertajuk “Negara Gagal Menghadapi Krisis Rakyat Menentukan Jalan Sendiri” dirilis pada 24 Maret 2020 dan kajian kedua bertajuk “Pandemi Dibajak Oligarki. Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus Law!” dirilis pada 13 Agustus 2020. Upaya ini menandakan bahwa Gejayan Memanggil memiliki argumentasi yang ilmiah, mengapa Omnibus Law Cipta Kerja mesti ditolak.

Pada kajian pertama, Gejayan Memanggil menggunakan tagar #ReformasiDikorupsi dan #GagalkanOmnibusLaw di sampul kajian yang mereka buat. Kedua tagar tersebut merepresentasikan kemarahan gerakan sipil ini,

⁸³ Dr. Abas, MPA., *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*, (Depok: Alta Utama, 2017), Hal. 210.

lantaran upaya pemerintah yang dianggap gagal menangani COVID-19. Selanjutnya, Gejayan Memanggil mengawali narasi kajiannya dengan persoalan ekonomi yang lemah. Sehingga, daya beli kelas menengah ke bawah menjadi turun.

Gejayan Memanggil juga membandingkan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan negara lain. Gerakan sipil ini memberi contoh upaya pemerintah negara lain dalam menangani COVID-19. Seperti negara Inggris yang memberi kompensasi sebanyak 80% dari total gaji para pekerja, Presiden Korea Selatan dan Menterinya yang memotong gaji 30% untuk penanganan COVID-19, dan pemerintah Kuba yang mengirim tenaga medis ke negara-negara terdampak.

“Sebaliknya di Indonesia, dalam kondisi darurat tersebut, Rezim Jokowi justru melakukan berbagai kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat. Di sektor perekonomian dan ketenagakerjaan dilakukan stimulus dengan mempercepat pengesahan Omnibus Law yang mengancam kesejahteraan buruh dan kerusakan ekologi. Pemerintah terbukti gagal memainkan peran sebagai pelindung bagi seluruh pekerja, terbukti dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 di poin II.4. menempatkan proses negosiasi pengusaha dan buruh tanpa kehadiran pemerintah.”⁸⁴

Selaras dengan itu, Gejayan Memanggil juga berpendapat bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tidak selayaknya dibahas saat COVID-19, ketika Indonesia menempati posisi negara urutan pertama di ASEAN yang memiliki tingkat kematian tinggi. Kemudian Gejayan Memanggil juga menyayangkan upaya pemerintah yang malah menggandeng *influencer* dengan menggelontorkan uang sebanyak 72 M agar menggenjot maskapai penerbangan dan meningkatkan destinasi wisata. Kegagalan pemerintah dalam membaca situasi juga dianggap berimplikasi kepada lambatnya penanganan COVID-19. Kemudian, pada bagian

⁸⁴ Aliansi Mahasiswa Bergerak, “Kajian Omnibus Law” (n.d.).

akhir kajian, Gejayan juga Memanggil merumuskan tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah ke dalam 31 petisi, yaitu:

1. Pecat segera Menteri Kesehatan Terawan Agus, karena telah gagal mengantisipasi pandemi COVID-19;
2. Test COVID-19 gratis untuk seluruh rakyat Indonesia;
3. Bangun infrastruktur dan fasilitas layanan kesehatan yang memadai, berkualitas dan adil bagi pasien dan tenaga medis;
4. Gratiskan biaya iuran BPJS kesehatan untuk semua warga;
5. Tingkatkan produksi masker, obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam negeri;
6. Alihkan produksi pabrik tekstil dan pakaian jadi ke produksi masker untuk kepentingan pemenuhan masker dan APD;
7. Bangun posko terpadu darurat COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia hingga level kecamatan; Rilis Sikap Aliansi Rakyat Bergerak, 24 Maret 2020
8. Libatkan mahasiswa kluster medika sebagai tim medis penanganan COVID-19;
9. Membuka partisipasi rakyat secara kolektif untuk terlibat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19;
10. Fungsikan semua laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia baik milik kedinasan, universitas dan swasta untuk riset dan test COVID-19;
11. Transparansi informasi dan logistik farmasi dalam penanganan COVID-19;
12. Mendorong solidaritas internasional untuk penanganan pandemi COVID-19.
13. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan;

14. Tanggung pendapatan pekerja formal dan informal selama COVID-19 (universal basic income);
15. Jaminan tidak ada PHK, jika pekerja dirumahkan berhak mendapatkan upah secara penuh;
16. Mendesak APBN perubahan untuk pengalihan pos anggaran dari pertahanan dan infrastruktur ke kesehatan, jaminan pangan dan subsidi untuk rakyat;
17. Efektivitas penggunaan dana negara (APBN dan APBD) untuk pembiayaan kesehatan;
18. Pemotongan gaji dan tunjangan bagi pejabat negara dan komisaris-direksi BUMN;
19. Efisiensi keuangan BUMN untuk mencegah terjadinya krisis utang BUMN;
20. Bubarkan lembaga dan jabatan publik yang memboroskan dana negara; Rilis Sikap Aliansi Rakyat Bergerak, 24 Maret 2020
21. Reshuffle tim ekonomi Jokowi karena gagal mengantisipasi krisis;
22. Stop proyek infrastruktur dan pemindahan ibukota baru;
23. Redistribusi kekayaan melalui pajak progresif orang kaya;
24. Redistribusi lahan yang dikuasai negara dan korporasi;
25. Tutup bantuan keuangan dari kreditur asing (IMF, World Bank, ADB, AIIB);
26. Renegosiasi utang luar negeri;
27. Tutup pasar saham selama masa darurat untuk mencegah pelemahan nilai tukar rupiah;
28. Tanggung beban biaya cicilan dan kredit rakyat kecil;

29. Stop kriminalisasi aktivis pro demokrasi dan penolak Omnibus Law;
30. Bebaskan biaya kuliah selama dua semester;
31. Cabut 4 RUU Omnibus Law, karena Omnibus Law tidak menjawab permasalahan disaat krisis ekonomi dan krisis COVID-19.

Pada kajian pertama ini Gejayan Memanggil menuntut isu yang begitu kompleks dan sangat krusial. Sebab, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dianggap mengancam hajat hidup masyarakat kelas menengah ke bawah bahkan marjinal. Parahnya, kebijakan ini disiapkan ketika warganya sedang bertaruh nyawa karena terserang pandemi. Seolah, pemerintah meletakkan kepentingan politis di atas kemanusiaan.

Selanjutnya, kajian kedua Gejayan Memanggil memuat jumlah halaman yang lebih panjang. Sama halnya dengan kajian yang pertama, Gejayan Memanggil juga masih mengaitkan Omnibus Law dengan COVID-19. Hal itu lantaran, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dianggap tidak memiliki sensitifitas terhadap keselamatan rakyatnya. Selain itu, Gejayan Memanggil juga menyebut pemerintah telah mengkhianati publik. Sebab, dalam situasi dan kondisi yang porak-poranda akibat pandemi, pemerintah masih sibuk membuat kebijakan yang makin merugikan rakyatnya.

Ada beberapa poin yang diangkat dalam kajian kedua, yakni: new normal menjadi kesalahan fatal; krisis kesehatan tetapi stimulus lambat cair; korporasi paling diuntungkan ketika PPh badan diturunkan; BUMN yang meminta terus disuntik dana APBN, tetapi rakyat diabaikan; bahanya UU No. 2 Tahun 2020 tentang alokasi APBN yang berbahaya; menyangkan mega

proyek infrastruktur tetap jalan; kartu pra kerja yang abal-abal; dampak pandemi pada pekerja.

Selain itu, Gejayan Memanggil juga memasukkan hasil kajian bagaimana kondisi pendidikan dalam tinjauan ekonomi politik ketika pandemi melanda. Sehingga, pendidikan yang digratiskan menjadi hak asasi manusia yang mesti didapatkan. Tidak hanya memberikan kritik, Gejayan Memanggil juga menyodorkan peta alokasi apabila uang kuliah tunggal (UKT) digratiskan. Kemudian, di bagian akhir kajian mengenai pendidikan, Gejayan Memanggil menuntuk beberapa poin, yakni:

1. Menggratiskan seluruh biaya pendidikan untuk semua jenjang dan semua jenis pembayaran (SPP, UKT, Dana Kemahasiswaan, Dana Gedung, dsb) selama 2 Semester untuk Mahasiswa PTN dan PTS (Universal Education) [bukan keringanan UKT]
2. Berikan layanan Internet Gratis di jam produktif/kuliah bagi mahasiswa dan tenaga pendidik selama pandemi
3. Hapuskan sistem Kampus Merdeka
4. Gratiskan biaya seluruh jenjang pendidikan untuk jangka panjang melalui pajak progresif terhadap perusahaan dan orang kaya di Indonesia
5. Hentikan praktik privatisasi dan komersialisasi sektor pendidikan
6. Reformasi kelembagaan universitas dengan pembentukan komite di level fakultas dan universitas yang terdiri dari serikat mahasiswa, pekerja akademik, senat akademik dan jajaran birokrasi kampus secara setara dan proporsional, serta pelibatan secara langsung mahasiswa dalam semua pengambilan keputusan/ kebijakan di kampus
7. Tuntut Nadiem Makariem mundur apabila tidak bisa melakukan kebijakan pro-mahasiswa

Selain itu, Gejayan Memanggil juga memasukkan isu kekerasan seksual dalam kajian yang mereka buat. Hal ini barang tentu lantaran kekerasan seksual dalam masa pandemi meningkat. Sehingga, Gejayan Memanggil juga menekankan bagaimana urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar lekas disahkan. Tidak hanya itu, Gejayan Memanggil juga mengidentifikasi jenis kekerasan seksual apa saja yang dimasukkan ke dalam RUU PKS, yakni:

1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi Seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual
9. Penyiksaan seksual

Sebagai gerakan yang berasal dari Yogyakarta, Gejayan Memanggil juga membuat analisis khusus mengenai Yogyakarta. Mereka mengangkat isu mengenai perampasan ruang hidup, krisis air dan lingkungan. Dari kajian yang dibuat oleh Gejayan Memanggil, seolah merepresantsikan ada banyak problem yang begitu kompleks. Sehingga, tidak seharusnya pemerintah terus mengerjakan kebijakan yang merugikan rakyat seperti Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi mesti mengurus substansi dari permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, Gejayan Memanggil juga secara lantang menolak Omnibus Law Cipta Kerja dengan 12 alasan, yakni:

- Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.
- Penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional
- Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law.
- Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi
- Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat
- Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat
- Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan
- Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing
- Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja
- Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah
- Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual.

- Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.

Maka, bisa dikatakan bahwa Gejayan Memanggil sebagai kelompok penekan ini menggunakan hasil kajian dari isu yang begitu kompleks dengan persoalan Indonesia, menjadi teguran kepada para pembuat kebijakan bahwa ada hal-hal yang lebih penting, krusial, dan urgen untuk ditangani. Tentu saja bukan mempercepat pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi kebijakan yang didasari dengan rasa kemanusiaan dengan memperhatikan banyak aspek.

B. Pembahasan

1. Pola Komunikasi Politik Gejayan Memanggil dalam Isu Omnibus Law Cipta Kerja

Komunikasi politik yang dilakukan Gejayan Memanggil saat menolak Omnibus Law Cipta Kerja cenderung konfrontatif. Hal ini dipicu lantaran aksi yang digelar sebelumnya, tuntutan Gejayan Memanggil tidak diindahkan; seperti perihal kebijakan-kebijakan yang tetap diloloskan kendati sudah mendapat penolakan dari beragam pihak, sementara kebijakan yang mesti lekas disahkan, masih saja diabaikan. Sebagai gerakan sipil yang mengagregasi kemarahan dan keinginan publik, Gejayan Memanggil melakukan komunikasi politik dengan pemerintah melalui aksi demonstrasi.

Gejayan Memanggil juga sepakat bahwa komunikasi dengan pemerintah hanya dilakukan melalui kekuatan massa. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberi umpan balik langsung kepada massa. Bukan pertemuan kecil yang tertutup dan tidak transparan kepada sekelompok individu. Hal ini nampak jika

Gejayan Memanggil menghindari negosiasi yang tertutup dan tidak melibatkan kepentingan publik.

“Komunikasi politik Gejayan Memanggil saat Omnibus cenderung lebih konfrontatif ketimbang saat Gejayan Memanggil 1 dan 2. Hal ini juga *ditrigger* oleh respon pemerintah saat Gejayan Memanggil 1 dan 2 yang tidak sesuai keinginan. Meskipun pola-pola yang tadi kusebutkan di atas juga tetap diterapkan. Tidak. Teman-teman menyepakati bahwa komunikasi dengan pemerintah dilakukan dengan kekuatan massa, maka jika pemerintah merespon, itu juga harus kepada massa, bukan pertemuan-pertemuan kecil yang tertutup dan tidak transparan.”⁸⁵

Sementara komunikasi dengan pemerintah di Yogyakarta, Gejayan Memanggil hanya sebatas pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi demonstrasi. Selain itu, upaya komunikasi ini juga menjadi salah penekan agar pemerintah tahu sedang diawasi oleh rakyatnya. Namun, pada realitasnya, pemerintah kerap merespons kekuatan massa ini dengan intimidasi, kekerasan, pembubaran secara paksa, dan lain sebagainya.

“Karena kita meyakini, jalur-jalur ini harus ada tekanan-tekanan secara politik. Lewat gerakan. Dan birokrasi di jogja kan tidak memungkinkan untuk itu. Ya kan harus di Jakarta. Itu bentuk komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi politik bahwa rakyat sekarang marah saat ini. dan mereka juga membalas komunikasi ini melalui tekanan lewat intimidasi, lewat macem-macam. Gitu.”⁸⁶

Gejayan Memanggil sebagai agregasi kemarahan dan kepentingan publik memiliki komunikasi politik yang erat kaitannya dengan kekuatan massa. Keberhasilan Gejayan Memanggil dalam mengorganisasi massa, juga menjadi capaian mereka dalam berkomunikasi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sehingga menimbulkan partisipasi politik yang parsial. Dalam hal ini,

⁸⁵ Wawancara dengan Gendis Syari sebagai Divisi Humas pada Jumat 25 Juni 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Ardi Syihab.

Gejayan Memanggil mencoba untuk “meramu” bahasa yang digunakan agar lebih “bersahabat” dan “intim”.

“Tidak ada yang spesifik sebetulnya ya, yang spesifik dirumuskan ini harus A, ini harus B. Itu enggak. Tetapi, cara komunikasi yang dilakukan itu memang dari bahasa yang sangat akademis ya, jadi bayangannya gini. Bayangkan, Omnibus Law kan kita ini meresensinya ke akademik ya, landasan filosofis, sosiologis sampai ideologi sampai situ. Sampai bahasa yang sangat, bahkan mungkin beberapa mahasiswa yang tidak suka bahasa-bahasa itu enggak begitu paham. Nah ini, sebenarnya tugas dari humas dan agitasi propaganda itu ya membuat bahasa yang sangat rumit itu dijadikan ke bahasa yang lebih simple.”⁸⁷

Tidak hanya komunikasi politik secara luring, Gejayan Memanggil juga menciptakan “ruang baru” di media sosial. Kemudian, “melempar bola” melalui tagar #GejayanMemanggil agar masyarakat ikut memproduksi wacana yang Gejayan Memanggil buat. Sehingga, peran masyarakat dalam “menangkap bola” melalui “ruang baru” ini juga menjadi salah satu keberhasilan Gejayan Memanggil dalam mengakomodir kepentingan publik.

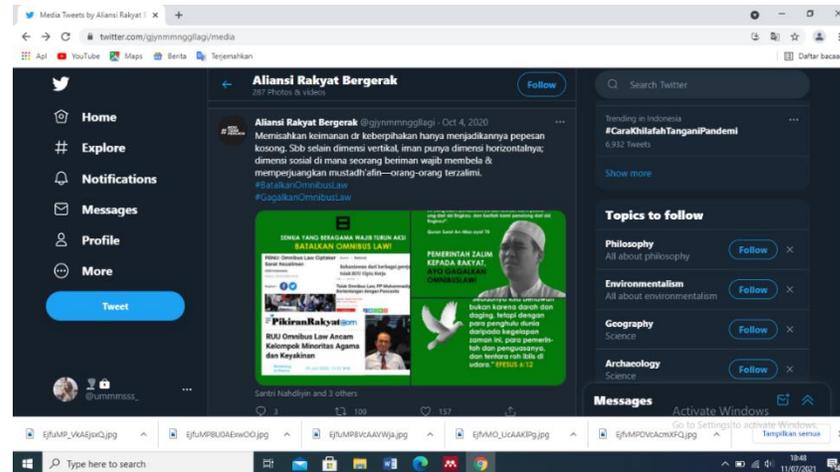
“Di media sosial itu kan rame ya. Jadi, apakah humas menyiapkan semua itu? Iya engga, tetapi pada hari sebelumnya, sudah disiapkan materi dan kajian yang relevan dengan itu. Sehingga, banyak mahasiswa. Banyak massa aksi yang ketrigger untuk membuat kreativitas masing-masing, gitu loh. Jadi, kuncinya tuh soal humasnya itu membuat satu dua bahan yang bisa dicerna oleh publik dan biarkan ikut ditelan oleh publik.”⁸⁸

Narasi yang dikembangkan oleh Gejayan Memanggil melalui daring juga bervariasi. Mereka menggunakan komunikasi verbal yang dapat diterima oleh beragam kalangan. Hal yang menarik dari komunikasi verbal ini, Gejayan Memanggil mampu mengaitkannya ke agama. Mereka merangkul seluruh umat yang beragama,

⁸⁷ Wawancara dengan Ardi Syihab sebagai Divisi Kajian pada Sabtu 11 Juli 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Ardi Syihab sebagai Divisi Kajian pada Sabtu 10 Juli 2021.

tanpa terkecuali, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Terlihat dari unggahan di bawah ini:



Gambar 1.8 tangkap layar Twitter Gejayan Memanggil

Tidak hanya mengajak umat yang beragama untuk menolak Omnibus Law. Namun, Gejayan Memanggil juga menyebutkan potongan ayat mengenai perlawanan terhadap rezim yang tidak berpihak kepada rakyatnya lantaran menghasilkan kebijakan yang sewenang-wenang. Tidak hanya mencantumkan potongan ayat agama mayoritas, tetapi juga agama minoritas. Berikut gambarnya:



Gambar 1.9 ajakan Gejayan Memanggil kepada umat beragama

Flyer yang menyebar seperti ini, menjadi hal yang cukup menarik. Sebab, agama yang kerap seolah jauh diri dari politik, Gejayan Memanggil mendekatkannya melalui komunikasi semacam ini. Sebab, jarang sekali ada gerakan yang mengaitkan dengan agama. Sentuhan pola komunikasi politik yang dilakukan oleh Gejayan Memanggil di media sosial; merangkul semua kalangan agar kesadaran politik tumbuh, dengan bahasa yang lebih intim. Menjadikan keputusan Gejayan Memanggil dalam mengampanyekan penolakan Omnibus Law sebagai langkah yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa media sosial memiliki kekuatan yang dapat mengubah *friendship-driven* menjadi *interest-driven* dalam kesadaran berperilaku politik.

“Nah, Gejayan Memanggil itu mampu merubah konsepsi gerakan yang partisipasinya hanya kebanyakan orang yang berorganisasi atau aktivis kampus. Gejayan Memanggil melompati itu. Pertama itu kuncinya soal partisipasi disini, dia nggak peduli orang itu. Elu itu siapa, enggak peduli organisasimu apa, enggak peduli orientasi seksualmu itu apa, yang penting ketika kau menolak dan sepakat dengan garis perjuangan ARB, ya kau hadir dalam aksi. Karena terkadang, yang menghalangi orang untuk terlibat di dalam aksi adalah hanya sesimpel masalah bendera. Ketika bendera berkibar, wah itu bukan bagian bendera dari kami. Itu orang tidak mau terlibat.”⁸⁹

Artinya, selain Gejayan Memanggil menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka juga mampu meruntuhkan polarisasi masyarakat yang kerap terjadi di tahun-tahun politik. Sementara itu, penggunaan komunikasi verbal yang ramah juga menjadi salah satu formula yang dimiliki Gejayan Memanggil dalam mengeksplorasi gerakan, sehingga partisipasi dalam aksi demonstrasi juga menciptakan massa yang begitu banyak dan tidak monoton.

“Loh ini siapa, kok isunya sepakat denganku. Iya udah, aku ikut. Gitu loh. Atau semisal, mahasiswa lagi rebahan di kamar, malem-malem liat twitter. Kok besok ada aksi, siapa yang ngadain. Kok semua bisa terlibat. Semua bisa gabung. Aku mau ikut. Gitu loh. Jadi, partisipasi-partisipasi semacam itu yang

⁸⁹ Wawancara dengan Ardi Syihab sebagai Divisi Kajian pada Sabtu 10 Juli 2021

bisa merubah. Termasuk kemasan-kemasan perlawanannya. Tidak selalu harus seret, harus anti kapitalisme, anti militarism. Tetapi dengan tagline-tagline yang lebih bisa dikunyah oleh anak muda. Jadi, berjuang dengan riang gembira itu ya ndak masalah.”⁹⁰

Maka, dapat dikatakan bahwa sebagai kelompok penekan yang mengagregasi kemarakan dan kepentingan rakyat, Gejayan Memanggil mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara komprehensif. Hal itu terjadi lantaran Gejayan Memanggil menciptakan ruang publik baru di media sosial. Sehingga, terjadi pola komunikasi politik yang unik; menggunakan komunikasi yang “bersahabat dan intim”.

Selain itu, Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dua paradigma komunikasi politik, disesuaikan dengan siapa komunikannya. Apabila komunikasi politik tersebut tertuju kepada sesama masyarakat sipil, yang Gejayan Memanggil lakukan adalah paradig konvergen. Dalam hal ini, Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan masyarakat sipil sebagai komunikan, membentuk komunikasi yang sederajat. Sehingga terjadi timbal balik.

Sementara pada pemerintah atau penguasa, pola komunikasi yang terjadi adalah pardigma divergen, dimana Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan penguasa sebagai komunikan, hanya terjadi satu arah dan tidak ada timbal balik. Salah satu indikasinya adalah bahwa pemerintah atau penguasa tetap menekan Omnibus Law sebagai undang-undang.

2. Efek Gerakan Gejayan Memanggil

Masyarakat sipil dalam banyak hal memang dianggap sebagai media bagi transformasi politik. Ini kerana masyarakat sipil bukan hanya diartikan sebagai

⁹⁰ Ibid.

ikatan sosial di luar organisasi rasmi yang mampu menggalang solidariti kemanusiaan bagi menciptakan kebaikan bersama yang bersifat universal (c.f. Cohen & Arato 1992), tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah serta menghalangi tindak tanduk mereka yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Gellner 1994:5). Selain itu, masyarakat sipil juga dipercayai mampu memainkan peranan sebagai pengawal kepentingan masyarakat awam dan dapat menghalang pemerintah dari upayanya untuk mendominasi dan memanipulasi masyarakat.⁹¹

Dari aspek inilah, masyarakat kemudian berinteraksi dengan pemerintah untuk memunculkan berbagai-bagai wacana kritikal yang objektif dan rasional sehingga berupaya meredam keinginan pemerintah untuk berlaku autokratik. Penentangan melalui gerakan masyarakat sipil pernah berjaya pada akhir tahun 1980-an, ketika beberapa negara di Eropah Timur runtuh (Diamond 1994; Wellhoer 2005). Ini menunjukkan peranan masyarakat sipil dalam menumbangkan kekuasaan rejim autokratik tidak boleh dipandang remeh.⁹²

Namun, gejayan Memanggil mengakui bahwa setiap gerakan masyarakat sipil tidak selalu mendapatkan “kepuasan” atas tuntutan-tuntutan yang mereka layangkan. Sebab, pemerintah terlalu bebal sehingga tetap mengabaikan kepentingan dan keinginan publik. Gejayan Memanggil juga berpendapat bahwa keberhasilan setiap gerakan tergantung dari perspektif dan parameter yang digunakan.

“Ini pertanyaan yang sering muncul juga. Meskipun seringkali dengan kalimat pertanyaan, “Apakah Gejayan Memanggil berhasil atau gagal?”. Bagiku, menjawab ini tergantung perspektif dan parameter keberhasilan dan kegagalan. Kalau parameternya adalah perubahan atau penarikan kebijakan, tidak boleh naif, jelas jawabannya adalah

⁹¹ L E O Agustino, “Mohammad Agus Yusoff Leo Agustino Universiti Kebangsaan Malaysia Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru From New Order To Reformasi Order: Indonesian Subnational Politics In Post-New Order Era” 39, no. July (2012): 76–97.

⁹² Ibid.

gagal. Kalau parameternya adalah tidak jadi disahkan atau ditunda, Gejayan Memanggil berhasil secara parsial.”⁹³

Kendati begitu, Gejayan Memanggil memiliki efek atau dampak dari sisi yang lain. Gejayan Memanggil berupaya menciptakan ruang publik baru dengan pola komunikasi politik secara horizontal. Dimana sesama masyarakat sipil, dapat membangun kesadaran politik. Sehingga, setiap sudut Yogyakarta seperti kafe, kampus, dan tempat perkumpulan dapat diisi dengan obrolan informal mengenai kebijakan di Indonesia. Hingga akhirnya tidak hanya aksi demonstrasi yang dinormalisasi, tetapi juga kebiasaan membahas isu mengenai politik di ruang publik.

“Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, Gejayan Memanggil sendiri tidak hanya hadir sebagai medium ekspresi vertikal (ke negara), tetapi juga horizontal (masyarakat). Dalam artian, ada keinginan kawan-kawan untuk membangkitkan lagi kesadaran politik masyarakat Yogyakarta yang, mengingat konteks *nrimo ing pandum* di sistem feodal Kesultanan, cenderung redup. Pada kurun waktu tertentu, kupikir penting untuk di-*highlight* bahwa bukan hanya demonstrasi yang dinormalisasi, tetapi juga kebiasaan membahas isu-isu politik di ruang publik. September-November 2019, hampir setiap ruang-ruang publik Yogya (kafe, kampus, pasar, tempat-tempat kumpul di perumahan) diisi oleh obrolan-obrolan informal dan ringan soal kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Bagiku ini juga sebuah progres dalam membentuk kesadaran sipil soal politi.”

Sementara pada gerakan sendiri, Gejayan Memanggil berhasil membuat formula baru ke dalam suatu gerakan. Mereka mampu mereformasi pola gerakan yang konvensional. Sehingga, perlawanan-perlawanan yang digunakan oleh masyarakat sipil tidak monoton, lalu dapat menghegemoni gerakan di daerah lain. Hal ini berimplikasi kepada partisipasi masyarakat luas yang turut terjun kepada perbincangan politik secara parsial. Agregasi

⁹³ Wawancara dengan Gendis Syari.

kemarahan dan keinginan publik yang dapat diakomodir dengan baik, mampu menciptakan kesadaran masyarakat sipil kepada politik. Hal ini terjadi, lantaran Gejayan Memanggil memanfaatkan media sosial secara serius. Maka, opini publik dapat tercipta secara komprehensif.

“Diketahui bahwa sebesar apapun gerakan ini, pada akhirnya pemerintah juga mengesahkan Omnibus Law kan. Itu sebenarnya satu hal yang disisi lain juga menjadi kirtik kita juga, bahwa sebesar itu pun gerakan tapi belum juga efektif. Namun, efeknya ini adalah, harus diakui bahwa cukup PD mengatakan bahwa Gejayan Memanggil cukup bisa hegemonic untuk menginspirasi di kota-kota lain dalam menolak Omnibus Law. Selain itu, Gejayan Memanggil juga menawarkan gagasan-gagasan baru dan merformasi aksi-aksi termasuk movement-movement yang ada dari yang konvensional. Gejayan Memanggil mampu membuat partisipasi publik secara luas, entah dengan media sosial, entah itu dengan kampanyanya yang ringan dan bisa dimaksimalkan oleh publik gitu. Jadi, meskipun secara obyektif kebijakan pemerintah tetap dilaksanakan, tetapi ada pondasi yang sudah diletakan Gejayan Memanggil dan tentang bagaimana dilibatkan masyarakat secara penuh ke mahasiswa agar lebih rame, dan lebih gede. Dan pondasi-pondasi itu sangat bagus.”

Seagai gerakan yang hadir di daerah yang kental dengan feodal kesultanan, Gejayan Memanggil mampu membentuk opini publik melalui media sosial sebagai formula dalam aksi demonstrasi. Kendati kebijakan yang tidak pro rakyat tetap dibuat oleh pemerintah, Gejayan Memanggil tetap berhasil membuat garis-garis komunikasi yang menghubungkan publik kepada pembuat kebijakan dengan tekanan-tekanan yang diproduksi.

Maka, yang terjadi dalam proses komunikasi politik ini adalah bahwa Gejayan Memanggil mempunyai efek akibat partisipasi dimana keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik ini terjadi di ruang publik melalui media sosial.

3. Teori Gerakan Sosial Baru pada Gerakan Gejayan Memanggil dalam Merespon Omnibus Law Cipta Kerja

Orang secara kolektif menegosiasikan makna bersama tentang segala sesuatu melalui transaksi mereka. Dengan menciptakan pengharapan atas perilaku satu sama lain, menyusun perilaku mereka sendiri, dan mengambil peran kemasyarakatan melalui tindakan bersama dan timbal balik, orang mengembangkan citra bersama, atau lambang signifikan, tentang konsep (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan), lembaga (kepresidenan, kongres, mahkamah agung), dan rakyat (pemimpin dan pengikut).⁹⁴

Dalam menyusun perilaku di atas, barang tentu mesti melakukan pemahaman mengenai bagaimana pembuat kebijakan menggunakan perwakilannya. Sehingga dapat menghasilkan upaya yang preventif apabila pembuat kebijakan kedapatan membuat regulasi yang ugul-ugalan. Dalam hal ini, Gejayan Memanggil menggunakan teori gerakan sosial baru dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, teori gerakan sosial baru bersifat plural. Yakni bergerak dari anti-rasialisme, anti-nukliarisme, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalism dan etnisitas, kebebasan sipil dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Dalam gerakan sosial baru, mencakup karakteristik berupa tujuan dan ideologi, taktik, struktur, partisipan.

Maka, selaras dengan teori tersebut, jika dijabarkan bahwa Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dalam hal ini Gejayan

⁹⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.223.

Memanggil kerap mempertanyakan kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak saja, contohnya Omnibus Law Cipta Kerja.

Selanjutnya, Gejayan Memanggil membuat taktik untuk meningkatkan kesadaran politik menggunakan teknologi media modern seperti Instagram dan twitter. Sehipun upaya yang dilakukan adalah salah satunya membentuk partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran politik bahwa kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja tidak layak untuk disahkan. Selain itu, Gejayan Memanggil juga tetap berada di luar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu (disruptive tactics) dan memobilisasi opini publik (mobilizing public opinion) untuk mendapatkan pengaruh politik.

Dalam memantik memobilisasi opini publik, Gejayan Memanggil lebih dulu mengkaji bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah ini tidak layak. Selain itu, gerakan ini juga menyodorkan deretan solusi yang mesti digunakan oleh pemerintah. Sementara pada pemberian suara, Gejayan Memanggil menggunakan suara berupa penolakan dengan beragam jenis tekanan. Salah satunya adalah Gejayan Memanggil memberikan suara langsung kepada pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuatan massa. Hal ini nampak pada aksi demonstrasi yang digelar dengan membawa ratusan massa aksi dan berkumpul di Gejayan.

Sementara pada struktur, dijelaskan bahwa Gejayan Memanggil juga menolak sentralisasi. Maka, mereka menggunakan pola polisentrisme untuk membentuk gerakan ini. salah satu indikasinya adalah bahwa tidak ada pemimpin terpusat, tetapi hanya ada divisi. Kemudian, partisipan yang terbentuk dari Gerakan Gejayan Memanggil partisipan dari gerakan sosial baru dapat digambarkan dari tiga sektor, yakni: kelas menengah baru (new middle class), elemen-elemen dari kelas menengah lama (seperti petani, LSM, pekerja media),

dan populasi feri-feri yang terdiri dari orang-orang yang tidak banyak terlibat dalam pasar kerja (seperti mahasiswa).

Gerakan semacam ini memang tidak bisa diremehkan. Kendati, pemerintah kerap tidak mengindahkan tuntutan yang dilayangkan. Namun, gerakan ini dapat menghimpun suara dan mengonvergensi suara individu menjadi pilihan rakyat. Maka, apabila pembuat kebijakan tetap bebal dengan kebijakan yang mereka buat, nampak bahwa pembuat kebijakan tidak membuat kebijakan berdasarkan potensi atau permasalahan masyarakat secara luas.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pengamatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan pada penelitian pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak omnibus law cipta kerja sesuai dengan rumusan masalah yakni bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi yang diwacanakan pemerintah dan bagaimana efek dari komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik dan menggerakkan massa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model plebisit, dimana teori ini fokus kepada proses komunikasi masyarakat sipil dalam menolak kebijakan yang digagas oleh pemerintah serta bagaimana masyarakat menggunakan teknologi modern agar komunikasi kebijakan ini dapat lebih efektif. Dari penggunaan teknologi modern ini, gerakan masyarakat sipil dapat mengakomodir suara individual menjadi pilihan rakyat. Berikut penjelasannya:

1. Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dua paradigma komunikasi politik, disesuaikan dengan siapa komunikannya. Apabila komunikasi politik tersebut tertuju kepada sesama masyarakat sipil, yang Gejayan Memanggil lakukan adalah paradigim konvergen. Dalam hal ini, Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan masyarakat sipil sebagai komunikan, membentuk komunikasi yang sederajat. Sehingga terjadi timbal balik.

Sementara pada pemerintah atau penguasa, pola komunikasi yang terjadi adalah pardigma divergen, dimana Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan penguasa sebagai komunikan, hanya terjadi satu arah dan tidak ada timbal balik. Salah satu indikasinya adalah bahwa

pemerintah atau penguasa tetap menekan Omnibus Law sebagai undang-undang.

2. Jika parameter yang digunakan adalah kebijakan tersebut gagal disahkan, maka Gejayan Memanggil tidak menimbulkan efek alias tidak berhasil. Sebab sekarang regulasi tersebut sudah diteken Oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun, Gejayan Memanggil memiliki efek akibat partisipasi dimana keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik ini terjadi di ruang publik melalui media sosial.

B. Saran

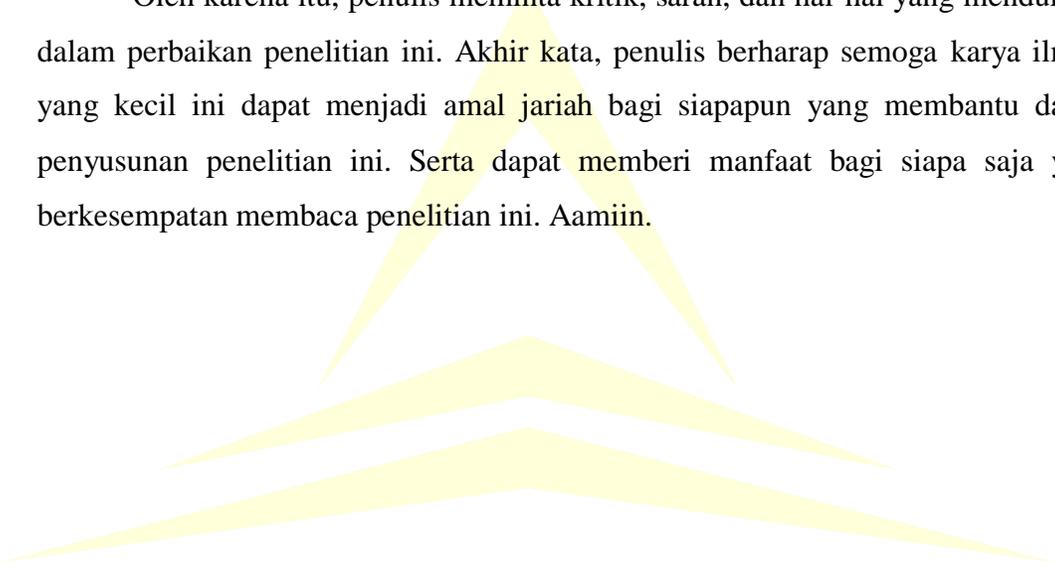
Melalui kesimpulan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa gerakan Gejayan Memanggil dalam mereformasi gerakan konvensional kepada gerakan yang lebih baru dan segar, sudah sangat baik. Sebab, apabila gerakan konvensional tetap dipertahankan, yang terjadi adalah upaya prefentif dalam menekan dan melawan sangat monoton. Sehingga, pemerintah atau penguasa menganggap situasi semacam itu, tidak perlu ditakuti lagi.

Kemudian, karena gerakan Gejayan Memanggil sudah mengisi kekeurangan formula yang terjadi dalam gerakan, sehingga diharapkan kepada seluruh gerakan masyarakat sipil lainnya mengadopsi gerakan Gejayan Memanggil dengan cara yang lebih segar lagi. Sebab, kendati Gejayan Memanggil sudah berhasil menciptakan partisipasi masyarakat, namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih saja disahkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang cukup singkat. Namun, penulis mengakui masih ada banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan penulis dalam menggali lebih dalam.

Oleh karena itu, penulis meminta kritik, saran, dan hal-hal yang mendukung dalam perbaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah yang kecil ini dapat menjadi amal jariah bagi siapapun yang membantu dalam penyusunan penelitian ini. Serta dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membaca penelitian ini. Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. 2017. *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*. Depok: Alta Utama.
- Agustino, L E O. “Mohammad Agus Yusoff Leo Agustino Universiti Kebangsaan Malaysia Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru From New Order To Reformasi Order: Indonesian Subnational Politics In Post-New Order Era” 39, no. July (2012): 76–97.
- Ahmad, Nyarwi. *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- Aliansi Mahasiswa Bergerak. “Kajian Omnibus Law” (n.d.).
- Almanshur, Djunaidi Ghony & Fauzan. 2012. *Metode penelitian kualitaif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amanu, Herdiansyah, and Lovia Evanne. “Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisruhan Di Partai Demokrat.” *Jurnal Balayudha* 1, no. 1 (2021): 26–32.
- Ambarita, Muharto dan Arisandy. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basyir, Kunawi. “Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339.
- Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–250.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunukasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Gaus, Gerald F and Chandran Kukathas. 2012. *Handbook: Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.

Habsy, Bakhrudin All. “Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur.” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

Heriyanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT Elkki, 7ex Media Komputindo.

Indrawan, Raden Mas Jerry. “Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat.” *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171.

Kuntowijoyo. 2018. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Lilleker, Darren G. 2006. *Key Concepts in Political Communication*. London: Sage Publication.

Madjid, Nurcholis. 1995. *Agama Dan Negara Dalam Islam: Telaah Krisis Atas Fiqh Siyasah Sunni,* in *Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Memanggil, Gejayan, and Rino Andreas. “Instagram dalam Perspektif Masyarakat Tontonan Rino Andreas” 4, no. 1 (2020): 43–62.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik: Hubungan Antara Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Politik, Terhadap Perilaku. "Jurnal KSM Eka Prasetya UI , Desember 2019 Volume 1, Number 1" 1, no. 1 (2019): 1–23.
- Posisi, Kertas. "12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (# Cilaka12)" (2020).
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Raco, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- Razy, Muhammad Fakhrrur, and Muhammad Fedryansyah. "Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 74.
- Rochiyat, Adang, and Arief Wibowo. "Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Popular Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter '#gejayanmemanggil.'" *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 6, no. 2 (2019): 130–138.
- Shen, Wen Ting, Jia Yu, Guang Yang Yang, Xiang Guo Cheng, and Rong Hao. "Cloud Storage Integrity Checking Scheme with Private Key Recovery Capability." *Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software* 27, no. 6 (2016): 1451–1462.
- Siagian, Haidir Fitra. "Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik." *Al-Khitabah* 11 (2015): 17–26.

- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suprpto, Tomy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Usman, Sunyoto. "Arah Gerakan Mahasiswa Gerakan Politik Ataupun Gerakan Moral." Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1999. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=9140>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Teori Hardiness menurut Kobasa)

Mengacu pada aspek kontrol, komitmen, dan tantangan

1. Bagaimana Gejayan Memanggil terbentuk?
2. Ide apa yang membentuk Gejayan Memanggil?
3. Apakah ada struktural di dalam Gejayan Memanggil?
4. Bagaimana Gejayan Memanggil membentuk massa?
5. Bagaimana pandangan gejayan pada isu omnibuslaw?
6. Bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun oleh Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja?
7. Bagaimana dampak dari gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik?
8. Pasal mana pada omnibuslaw yang paling disorot gejayan? Apa alasannya?
9. Adakah upaya gejayan untuk melakukan audiensi atau advokasi antara pemerintah dengan representasi masyarakat?
10. Perombakan divisi setelah pandemi itu apa saja?
11. Bagaimana bentuk koordinasi masing-masing divisi?
12. Gejayan Memanggil masuk ke dalam gerakan apa?
13. Apakah respons Gejayan Memanggil terhadap isu politik lain juga sama dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja?
14. Apa yang direpresentasikan Gejayan Memanggil dalam setiap gerakan?
15. Apa tujuan Gejayan Memanggil sebagai salah satu gerakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang?
16. Bagaimana cara Gejayan Memanggil mengomunikasikan tujuan tersebut?

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

1. Narasumber : Gendis Syari Widodari
 Lokasi wawancara : Media sosial WhatsApp dan Email
 Tujuan wawancara : Menggali bagaimana Gejayan Memanggil dibentuk dan bagaimana pengorganisasian massa
 Keterangan : Pertanyaan dicetak tebal, jawaban dicetak miring

Penulis **Bagaimana Gejayan Memanggil terbentuk?**

“Proses terbentuknya Gejayan Memanggil diawali oleh sekumpulan orang, notabene mahasiswa dari diskusi-diskusi informal. Kami pada saat itu jumlahnya kira-kira cuma 20 orang. Setelah diskusi-diskusi itu, kami merasa butuh merespon rangkaian kebijakan negara yang dinilai tergesa-gesa, tidak transparan, dan merugikan pihak tertentu (terutama masyarakat kelas bawah dan kelompok marginal). Diskusi kemudian berkembang menjadi konsolidasi. Kami sadar bahwa mahasiswa hanya satu dari banyaknya elemen masyarakat. Maka teman-teman memutuskan untuk membangun jejaring dari banyak elemen; LSM/NGO, mahasiswa, akademisi kampus, pekerja-pekerja dari berbagai sektor (baik formal maupun informal), dan masyarakat umum. Dari konsolidasi kemudian dirumuskan bentuk respon seperti apa yg ingin diberikan. Lahirlah Gejayan Memanggil dengan metode demonstrasi yg diiringi oleh 7 tuntutan (untuk Gejayan Memanggil 1) dan 9 tuntutan (untuk Gejayan Memanggil 2).”

Penulis **Ide apa yang membentuk Gejayan Menanggil?**

“Tentu yg menjadi landasan utama Gejayan Memanggil hadir adalah rangkaian kebijakan yg sudah kusinggung di bagian sebelumnya. Tapi ada beberapa konteks yg mentrigger Gejayan Memanggil kemudian didesain sedemikian rupa.

1. Polarisasi Pilpres 2019

Pilpres melahirkan dua kubu yg sangat terpolar. Ada anggapan biner bahwa masyarakat sipil hanya terbagi menjadi dua; cebong dan kampret. Mereka yg mengafirmasi tindakan pemerintah adalah cebong, dan mereka yg mengkritik pemerintah adalah kampret. Padahal banyak elemen masyarakat yg kepentingannya tidak direpresentasikan oleh keduanya. Bahkan, kampret sebagai oposisi dinilai tdk mampu membawa narasi-narasi progresif utk menandingi dominasi pemerintah. Maka ada urgensi utk membuat blok sipil baru, yaitu blok ketiga, yg coba dibawa oleh Gejayan Memanggil dgn narasi Mosi Tidak Percaya terhadap Elit Politik dan Ekonomi.

2. Sejarah Gejayan

Sejarah Gejayan sendiri menjadi salah satu alasan penempatan lokasi demonstrasi. Gejayan adalah salah satu lokasi aksi terbesar dalam sejarah Jogja pada 1998 silam yg memakan korban jiwa, Moses Gatot Kaca. Ada keinginan utk mengubah wajah Gejayan yg penuh duka ketika dikaitkan dgn demonstrasi, menjadi perlawanan inklusif dan suka cita. Di sisi lain, lokasi Gejayan cukup strategis melihat banyaknya kampus2 yg bisa dijadikan titik kumpul dan zona evakuasi.

3. Aksi Daerah

Gerakan sipil selama ini dinilai sangat terpusat di Jakarta. Ketika demonstrasi RUU KPK (sekarang sudah jadi UU), aksi Jakarta menjadi aksi satu2nya yg disorot. Sebagai solidaritas kepada kawan2 Jakarta, juga keinginan utk membuat narasi perlawanan menjadi satu Indonesia, sekaligus mentrigger kawan2 di daerah lain, Gejayan Memanggil hadir.”

Penulis

Apakah ada struktural di dalam Gejayan Memanggil?

“Tidak. Gejayan Memanggil sedari awal bersifat leaderless. Kami tidak melihat relevansi adanya pemimpin atau struktur kepemimpinan/komando apapun utk menghindari dua hal; 1) penokohan terhadap aktor-aktor tertentu (mengingat pelajaran 1998 silam); 2) gerakan menjadi terlalu birokratis ketimbang substantif. Gejayan Memanggil mengadopsi pola polisentris, di mana ada divisi-divisi tanpa pemimpin yang memiliki kedudukan sama dan saling berkoordinasi. Divisi-divisi ini meliputi 1) Acara (dan jejaring); 2) Humas (di dalamnya juga ada Media dan Kajian); 3) Agitasi dan Propaganda; 4) Keamanan; 5) Medis. 6 perkap 7 logistik. Siapapun boleh masuk dan terlibat sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya. Saya sendiri kebetulan ada di divisi humas, spesifiknya membantu menyusun kajian untuk Gejayan Memanggil 1 dan Gejayan Memanggil 2.”

Penulis

Bagaimana Gejayan Memanggil membentuk massa?

“Ada dua medium pengorganisasian massa yang digunakan: Secara offline, kawan-kawan diajak untuk mengajak organisasi atau perseorangan yang dikenalnya untuk mendiskusikan persoalan negara bersama-sama. Kemudian, mereka diajak berkumpul dan jika tertarik, ikut andil dalam Gejayan Memanggil. Pola komunikasi

online ini cukup menarik. Teman-teman Gejayan Memanggil mencoba memetakan elemen-elemen masyarakat di Jogja dan karakteristik-karakteristik setiap kelompoknya. Pemetaan ini dilakukan dengan detail, sehingga bahasa dan simbol komunikasi Gejayan Memanggil bisa membuat mereka relate. Pola ini dilakukan dengan sistem personalized campaign melalui #GejayanMemanggil. Dalam artian, setiap orang bisa berkontribusi di tagar, membawa isu-isu yang mereka ingin angkat berdasarkan bahasa dan audiens mereka sendiri. Ketika kita melihat tagar, kita yg awalnya mungkin hanya aware di isu A dan B, bisa melihat isu2 lainnya seperti C dan D. Ada komunikasi intrapersonal yg terjadi di ruang digital dengan konten-konten yg personalized. Di sini juga kurasa penting untuk mengangkat kehadiran meme dan jokes. Rasionaliasi kawan-kawan adalah Gejayan Memanggil ingin menghadirkan titik temu antara budaya populer dengan kesadaran politik.”

Penulis

Bagaimana pandangan gejayan pada isu Omnibus Law?

“Omnibus law adalah isu terpisah dari Gejayan Memanggil 1 dan Gejayan Memanggil 2. Tapi ARB (organizer GM) punya sikap terkait Omnibus Law. Bisa dibaca di <https://drive.google.com/drive/folders/1DpunJOONma0q1LUzd2wI0UhbQ1nc59WT>.”

Penulis

Bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun oleh Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja?

“Komunikasi politik Gejayan Memanggil saat Omnibus cenderung lebih konfrontatif ketimbang saat Gejayan Memanggil 1 dan 2. Hal ini juga di-trigger oleh respon pemerintah saat Gejayan Memanggil 1

dan 2 yang tidak sesuai keinginan. Meskipun pola-pola yang tadi kusebutkan di atas juga tetap diterapkan.”

Penulis **Bagaimana dampak dari gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik?**

*“Ini pertanyaan yang sering muncul juga. Meskipun seringnya dengan kalimat pertanyaan “Apakah Gejayan Memanggil berhasil atau gagal?” Bagiku, menjawab ini tergantung perspektif dan parameter keberhasilan dan kegagalan. Kalau parameternya adalah perubahan/penarikan kebijakan, tidak boleh naif, jelas jawabannya adalah gagal. Kalau parameternya adalah tidak jadi disahkan/ditunda, Gejayan Memanggil berhasil secara parsial. Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, Gejayan Memanggil sendiri tidak hanya hadir sebagai medium ekspresi vertikal (ke negara), tetapi juga horizontal (masyarakat). Dalam artian, ada keinginan kawan-kawan untuk membangkitkan lagi kesadaran politik masyarakat Jogja yang, mengingat konteks *nrimo ing pandum* di sistem feodal Kesultanan, cenderung redup. Pada kurun waktu tertentu, kupikir penting untuk di-highlight bahwa bukan hanya demonstrasi yang dinormalisasi, tetapi juga kebiasaan membahas isu-isu politik di ruang publik. September-November 2019, hampir setiap ruang-ruang publik Jogja (kafe, kampus, pasar, tempat-teman kumpul di perumahan) diisi oleh obrolan-obrolan informal dan ringan soal kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Bagiku ini juga sebuah progres dalam membentuk kesadaran sipil soal politik.”*

Penulis **Pasal mana pada omnibuslaw yang paling disorot gejayan? Apa alasannya?**

“Bisa dilihat di

<https://drive.google.com/drive/folders/1DPunJOONma0q1LUzd2wI0UhbQ1nc59WT>.”

Penulis

Adakah upaya gejayan untuk melakukan audiensi atau advokasi antara pemerintah dengan representasi masyarakat?

“Tidak. Teman-teman menyepakati bahwa komunikasi dengan pemerintah dilakukan dengan kekuatan massa, maka jika pemerintah merespon, itu juga harus kepada massa, bukan pertemuan-pertemuan kecil yang tertutup dan tidak transparan.”



IAIN PURWOKERTO

2. Narasumber : Ardi Syihab
 Lokasi wawancara : Media sosial WhatsApp
 Tujuan wawancara : Menggali bagaimana Gejayan Memanggil membentuk propaganda dan kajian
 Keterangan : Pertanyaan dicetak tebal, jawaban dicetak miring

Penulis **Perombakan divisi setelah pandemi itu apa saja?**

“Antara divisi dalam menyiapkan massa aksi dengan hari H dan H-3 H-5 itu berbeda. Itu yang harus digaris bawahi. Bedanya ya itu, pada hari sebelumnya lebih berfokus pada kajian dan agitasi propaganda itu. Nah, kalau sudah hari H, ya mengadakan teklap. Jadi, kalau yang pra aksi itu lebih menekankan pada kajian dan humas atau agitasi propogandanya. Jadi, kajian itu berfungsi untuk merumuskan secara akademik ya, Omnibus Law kek mana ya dibagi per kluster itu. Kan ada 11 itu kan. Iya itu dikaji satu-satu. Dibagi tim, satu tim ngurusin satu kluster. Satu tim ngurusin kluster yang lain, sampai terbentuk 11 tim dengan kluster masing-masing. Nah, sampai kemudian ada juga kumpul besarnya ketika ngomongin perspektif formal yuridis sampai ekonomi politik itu kumpulnya bareng juga dibagah juga soal itu. Nah, dari hasil kajian itu. Itu difungsikan untuk bagaimana supaya dicerna lebih baik di masyarakat ya kan, sehingga bahasanya harus diperhalus, bahasanya harus tidak terlalu rumit, harus simplikatif. Karena kan kajian ini kan standarnya ilmiah dan akademis dan humas agitasi propaganda itu standarnya adalah supaya masyarakat bisa nangkep apa yang kita suarakan.”

Penulis **Divisi di Gejayan Memanggil apa saja?**

“Acara, humas (media dan kajian), agitasi propaganda, medis, keamanan, perkap, logistik, kebersihan. Walaupun keamanan dan kebersihan itu kadang sama.”

Penulis

Bagaimana cara Gejayan Memanggil dalam pemilihan bahasan atau wacana produksi?

“Tidak ada yang spesifik sebetulnya ya, yang spesifik dirumuskan ini harus A, ini harus B. Itu enggak. Tetapi, cara komunikasi yang dilakukan itu memang dari bahasa yang sangat akademis ya, jadi bayangannya gini. Bayangkan, Omnibus Law kan kita ini meresensinya ke akademik ya, landasan filosofi sosiologis sampai ideologi sampai situ. Sampai bahasa yang sangat, bahkan mungkin beberapa mahasiswa yang tidak suka bahasa-bahasa itu enggak begitu paham. Nah ini, sebenarnya tugas dari humas dan agitasi propaganda itu ya membuat bahasa yang sangat rumit itu dijadikan ke bahasa yang lebih simple. Gitu.. nah, prinsipnya gitu. Soal bagaimana aplikasinya ya kita serahkan ke bagian humas. Kita memberikan kebebasan orang di humas untuk ya monggo, yang penting ini bisa diterima dengan gambar dengan infografis. Bahkan dengan video ya. Dengan tik tok lah. Gitu gitu loh. Poster-poster lah. Nah, sebenarnya dari humas itu apa ya. Mencoba, bisa dikatakan membuat contoh dan bahan-bahan untuk melempar wacananya kepada publik. Di media sosial itu kan rame ya. Jadi, apakah humas menyiapkan semua itu? Iya enggak, tetapi pada hari sebelumnya, sudah disiapkan materi dan kajian yang relevan dengan itu. Sehingga, banyak mahasiswa. Banyak massa aksi yang ketriggery untuk membuat kreativitas masing-masing, gitu loh. Jadi, kuncinya tuh soal humasnya itu membuat satu dua bahan yang bisa dicerna oleh publik dan biarkan ikut ditelan oleh

publik. Kira-kira jadinya kaya apa. Kreativitasnya kan macem-macem. Kita juga kadang kaget, kok bisa ada yang luar biasa. Tapi, lebih dia (humas) melempar bola dan bola itu ditangkap oleh massa aksi yang lain. Karena itu kan kreativitas massa aksi masing-masing, bukan perintah dari siapapun.”

Penulis **Total Gejayan Memanggil berapa?**

“Dalam satu gerakan, kita enggak bisa menyimpulkan berapa. Karena setiap gerakan, kita enggak ngitung. Jadi, tergantung momentumnya.”

Penulis **Bagaimana Gejayan Memanggil tentang pola polisentrisme seperti apa?**

“Jadi, aliansi itu sebetulnya di Gejayan Memanggil. Sebenarnya di semua aliansi seperti itu. Hanya ada Korlap dan Kortup. Jadi, bukan menjadi jabatannya lebih tinggi dari yang lain tapi ya untuk memastikan sentral informasinya itu terpusat.”

Penulis **Apakah respons Gejayan Memanggil terhadap isu politik lain sama dengan respons terhadap Omnibus Law Cipta kerja?**

“Sama sih sebenarnya. Tapi memang yang jadi centra, tapi yang menjadi titik itu adalah Gejayan Memanggil selalu membuat kajian secara serius dari perspektif keilmuannya, perspektif akademis itu dibuat secara serius. Di semua isu, pasti. Nah, sehingga, dengan itu, baru bisa kita melangkah lagi jika kajiannya sudah fix. Begitulah kira-kira. Bahwa kemudian soal hasil yang dicapai itu beda-beda. Bahwa yang algoritma yang dilakukan itu ya sama.”

Penulis **Tujuan Gejayan Memanggil dalam jangka panjang, pendek, menengah?**

“Gejayan Memanggil itu aliansi yang luas, didalamnya itu mempunyai perspektif yang beragam. Ada yang bilang nih, enggak harus ada negara. Harus revolusi total. Ada juga yang reformis. Ya udah perbaiki aja. Ada yang reformis, ini masalah UU kok, jadi tolak UUnya saja. Ada juga yang berpikir bahwa kita mesti membuat partai tandingan. Tetapi, yang menjadi titik kunci adalah bagaimana yang didepan mata, kebijakan yang sedang dalam proses perencanaan pemerintah itu ketika tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan merugikan secara esensial, ya ditolak lewat movement.”

Penulis

Bagaimana Gejayan Memanggil mengomunikasikan tujuannya tersebut?

“Tentu persuasive dan kita datang ke masyarakat. Missal gini, sesuatu yang mencolok, kita selalu berkomunikasi dengan RT RW setempat kita akan melakukan aksi. Biasanya seperti itu, supaya masyarakat yang lihat itu mendukung. Karena kita juga menjelaskan apa saja yang kita tuntut. Yang kedua, itu tentang komunikasi media sosial. Kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ngeri, tetapi menggunakan bahasa yang santai.”

Penulis

Komunikasi ke pemerintah seperti apa?

“Kita enggak pernah berkomunikasi dengan pemerintah, satu-satunya, paling ini ya, pemberitahuan aksi. Komunikasinya hanya itu. Karena kita meyakini, jalur-jalur ini harus ada tekanan-tekanan secara politik. Lewat gerakan. Dan birokrasi di jogja kan tidak memungkinkan untuk itu. Ya kan harus di Jakarta. Itu bentuk komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi politik bahwa rakyat sekarang marah saat ini. dan mereka juga membalas komunikasi ini melalui tekanan lewat intimidasi, lewat macem-macem. Gitu.”

Penulis **Apa yang direpresentasikan Gejayan Memanggil dalam setiap gerakan?**

“Gejayan Memanggil adalah aregasi dari kemarahan dan keinginan publik itu. Sebetulnya yang hebat itu bukan GM nya atau ARB nya tapi kita berhasil merangkul keresahan itu dalam satu momentum besar yaitu melalu aksi-aksi yang dilakukan, ya itu melalui agitasi, lewat argumentasi yang dikaji secara mendalam. Gitu aja. Tapi bahwa soal lompatan-lompatan yang berhasil dilakukan itu seberapa keresahan-keresahan masyarakat.”

Penulis **Bagaimana GM memandang Omnibus Law dalam perspektif komunikasi?**

“Pertama kan, ini naskah di undang-undangnya itu kan secara aturan perundang-undangan kemudian secara moral juga sebagai wakil rakyat sebagai DPR yang mengetok dan juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan kan mestinya mengambil stekholder yang terlibat dan akan terdampak dalam kebijakan tersebut. Contohnya buruh. Ya terbukti bahwa buruh itu sama sekali tidak dilibatkan. Mereka dilibatkan, diundang. Tetapi ketika masuk di dalamnya, dia hanya disuruh tanda tangan apa yang sudah tertuang di dalamnya. Itu sama saja membodohi. Makanya terbukti ketika itu kemarin buruh kan sempat terpecah ketika 2019. Ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Jokowi. Tapi dalam isu omnibus law, mereka sepakat dengan itu. Artinya kelas buruh tidak satu pun mendukung itu. Waktu Gejayan Memanggil 2, saya ini kan sudah terlibat dalam gerakan di jogja itu 10 tahunan. Nah, GM ini memiliki variasi baru. Sehingga begitu luar biasa masyarakat yang terlibat di dalamnya. GM berhasil medistrapsi gerakan-gerakan yang lama. Dulu tu gini,

masing-masing pimpinan organisasi ataupun organisasi mahasiswa atau organisasi dari BEM kumpul jadi satu yak an. Rapat. Terus dilist nih orangnya berapa. Oya dari kampus ini berapa, organisasi ini berapa terus rapat. Habis rapat kemudian udah, aksi. Ya udah, polanya seperti itu aja terus-menerus.

Nah, GM itu mampu merubah konsepsi gerakan yang partisipasinya hanya kebanyakan orang yang berorganisasi atau aktivis kampus. Nah, GM melompati itu. Pertama itu kuncinya soal partisipasi disini, dia nggak peduli orang itu, elu itu siapa, enggak peduli organisasimu apa, enggak peduli orientasi seksualmu itu apa, yang penting ketika kau menolak dan sepakat dengan garis perjuangan ARB, yak au hadir dalam aksi. Begitu. Karena terkadang, yang menghalangi orang untuk terlibat di dalam aksi adalah hanya sesimpel masalah bendera. Ketika bendera berkibar, wah itu bukan bagian bendera dari kami. Itu orang tidak mau terlibat kadang-kadang. Nah, makanya kan disetiap aksi kita enggak ada bendera. Nah, ya, sebetulnya untuk siapapun orang yang kadang-kadang tukang becak mau di jalan lewat selebaran. Oya, ini aku. Loh ini siapa, kok isunya sepakat denganku,. Iya udah, aku ikut. Gitu loh. Atau semisal, mahasiswa lagi rebahan di kamar, malem-malem liat twitter. Kok besok ada aksi, siapa yang ngadain. Kok semua bisa terlibat. Semua bisa gabung. Aku mau ikut. Gitu loh. Jadi, partisipasi2 semacam itu yang bisa merubah. Termasuk kemasan-kemasan perlawanannya. Tidak selalu harus seret, harus anti kapitalisme, anti militarism. Tetapi dengan tagline-tagline yang lebih bisa dikunyah oleh anak muda. Jadi, berjuang dengan riang gembira itu ya ndak masalah.

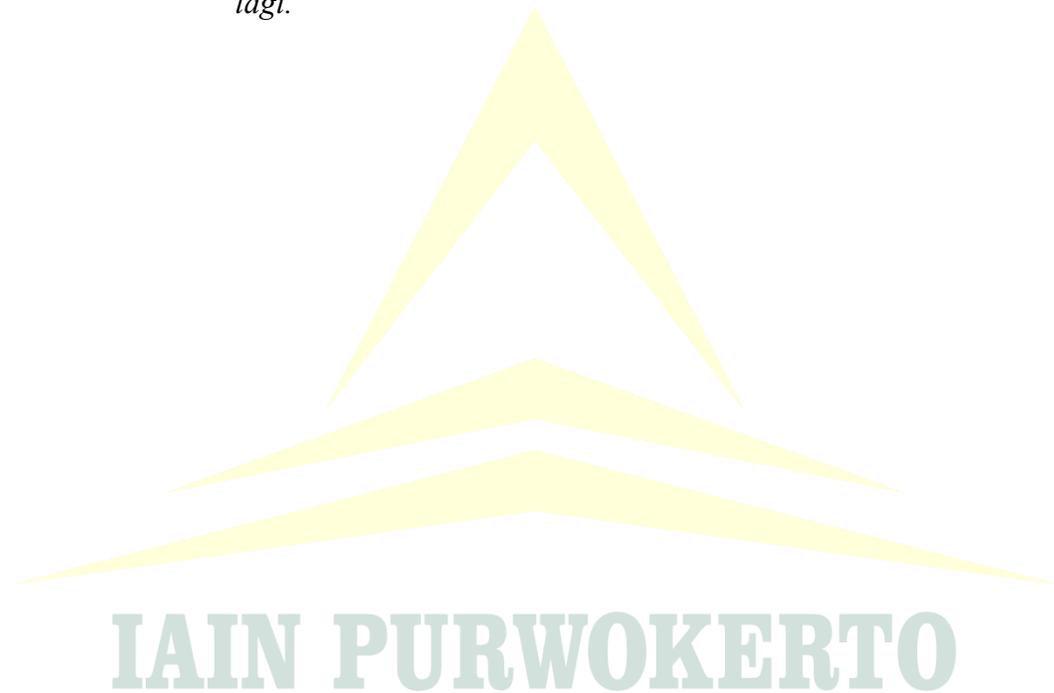
Dan, yang kedua itu sosmed. Gerakan-gerakan sebelumnya tidak memanfaatkan medsos secara serius. Ya, pasti mereka melakukan agitasi dan propaganda di media sosial tetapi tidak seserius yang dilakukan oleh GM. GM itu menggunakan medsos secara serius. Supaya ini jadi trending topik, bagaimana isunya itu dikemas tidak berhenti di kalangan aktivis. Tapi juga bergerak di lingkaran-lingkaran lain, misal orang Gejayan Memanggil orang aktivis lama 98 pasti akan nyaut nih ketika memori kenangan dulu di gejayan dibangkitkan lagi. Atau orang-orang, apasih pentingnya K-Popers menolak Omnibus Law itu. Jadi, itu dilakukan pendiskusian secara serius juga di media-media sosial. Sehingga, keramaian dan keriuhan di media sosial itu mempengaruhi besarnya partisipasi publik di lapangan juga.

Penulis

Apa efek dari Gejayan Memanggil?

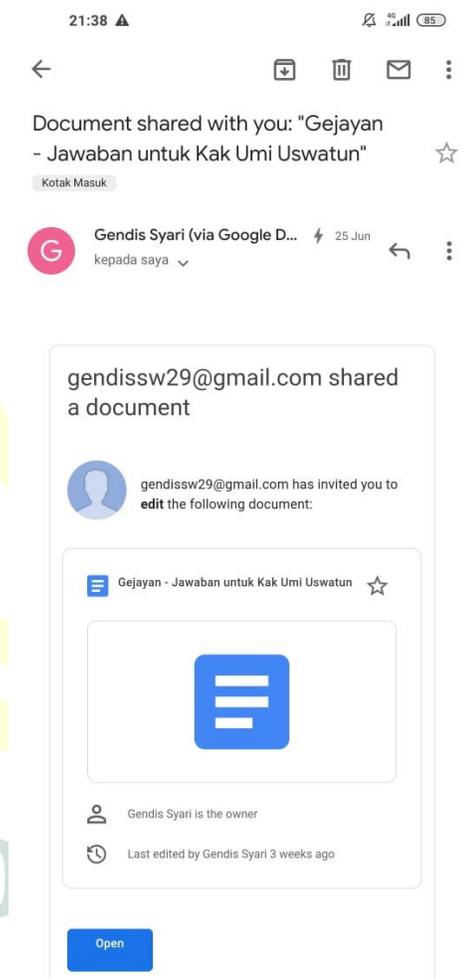
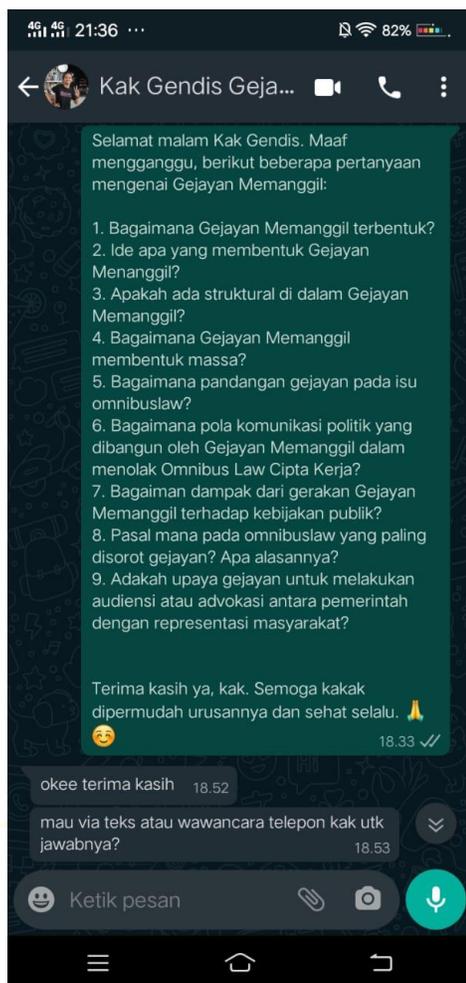
“Enggak, diketahui bahwa sebesar apapun gerakan ini, pada akhirnya pemerintah juga mengesahkan Omnibus Law kan. Itu sebenarnya satu hal yang disisi lain juga menjadi kirtik kita juga, bahwa sebesar itu pun gerakan tapi belum juga efektif. Benar-benar ini yah, pemerintah . efeknya ini adalah, harus diakui bahwa cukup PD mengatakan bahwa GM cukup bisa hegemonic untuk menginspirasi di kota-kota lain dalam menolak Omnibus Law. Iya kan? Selain itu, GM juga menawarkan gagasan-gagasan baru dan merformasi aksi-aksi termasuk movement-movement yang ada dari yang konvensional. GM mampu membuat partisipasi publik secara luas, entah dengan media sosial, entah itu dengan kampanyanya yang ringan dan bisa maksimalkan oleh publik gitu. Jadi, meskipun secara obyektif kebijakan pemerintah tetap dilaksanakan, tetapi ada pondasi

yang sudah diletakan GM dan tentang bagaimana dilibatkan masyarakat secara penuh ke mahasiswa agar lebih rame, dan lebih gede. Dan pondasi-pondasi itu sangat bagus. Intinya, gerakan-gerakan sudah ada formula lah. Dulu tu aksi cuman paling banter ratusan, kalau ribuan ya nunggu may day. Kan gitu. Atau nunggu BBM, kalau sekarang minimal kita punya formula-formula ke sana. Oh langkahnya gini dulu, seperti apa, seperti apa. Dan bisa kita ulangi lagi.”



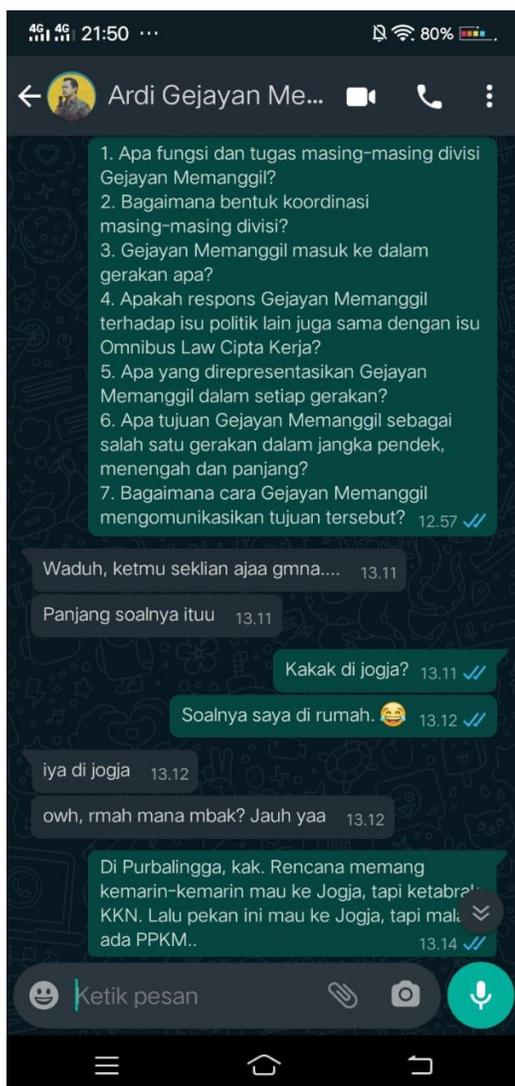
Lampiran 2

Foto dokumentasi penelitian



Lanjutan

Foto dokumentasi penelitian



Lampiran 3**Blangko bimbingan skripsi****BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Umi Uswatun Hasanah
 NIM : 1717102127
 Jurusan Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
 Dosen Pembimbing : Nur Azizah S.Sos.I., M.Si.
 Judul Skripsi : Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Senin/22	Proposal Skripsi		
2	Maret	Senin/29	Revisi proposal skripsi		
3	Maret	Rabu/31	Acc proposal skripsi		
4	April	Kamis/8	konsultasi Revisi proposal		
5	Juni	Selasa/1	Konsultasi BAB 1		
6	Juni	Kamis/17	Konsultasi BAB 2		
7	Juni	Senin/21	Revisi BAB 1 dan 2		
8	Juli	Rabu/14	Konsultasi BAB 3 dan 4		

*Diisi pokok-pokok bimbingan

**Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 17 Juli 2021

Pembimbing.



Nur Azizah S.Sos.I., M.Si.

NIP. 198101172008012010

Lampiran 4**Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

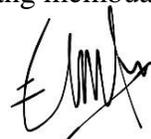
Nama : Umi Uswatun Hasanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Banjaran RT 02 RW 01 Kecamatan Bojongsari,
 Purbalingga
 No. Handphone : 085 750 544 684
 Email : umiuswatun17@gmail.com

Pendidikan Formal
 Tahun 2004-2005 : BA Aisyiyah Banjaran
 Tahun 2005-2011 : MIM Banjaran
 Tahun 2011-2014 : MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga
 Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 01 Purbalingga
 Tahun 2017-Sekarang : Mahasiswi S1 Komunikasi Penyiaran Islam Institut
 Agama Islam Negeri Purwokerto

Pengalaman Organisasi
 Tahun 2019-2020 : Pimpinan Umum LPM Saka

Purwokerto, 17 Juli 2021

Yang membuat


Umi Uswatun Hasanah

1717102127